

Pembelajaran dari
pandemi COVID-19

**Temuan dan rekomendasi
dari 12 negara untuk
pengadaan barang dan jasa
pemerintah dalam kondisi
darurat yang lebih baik**

Pembelajaran dari pandemi COVID-19

Temuan dan rekomendasi dari 12 negara untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kondisi darurat yang lebih baik

1 Tinjauan Umum	5
2 Ringkasan Eksekutif	6
3 Temuan dan Rekomendasi	8
4 Temuan dari Berbagai Negara	16
Kota Buenos Aires, Argentina	16
Kolombia	20
Ekuador	24
Georgia	28
Guatemala	34
Kenya	37
Lithuania	41
Nepal	46
Nigeria	47
Paraguay	53
Filipina	55
Uruguay	60

Open Contracting Partnership 2020.

Kecuali dinyatakan lain, produk dari Open Contracting Partnership ini dilindungi lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Untuk dokumen asli dalam bahasa Inggris silakan lihat [di sini](#).

1 Tinjauan Umum

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Dalam perkembangan selanjutnya, jelas bahwa upaya respons pandemi tidak bisa dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disingkat PBJ) pemerintah yang efektif dan transparan, seperti untuk pembelian masker, sarung tangan dan gaun medis, dan alat perlindungan diri lainnya serta alat medis seperti ventilator. Dalam situasi darurat seperti ini, di berbagai negara, PBJ dengan mekanisme reguler tidak lagi menjadi prioritas. Pemerintah-pemerintah pun dengan segera mengaktifkan peraturan pengadaan dalam keadaan darurat untuk mempercepat upaya respons wabah. Dengan berlakunya mekanisme ini pun, tidak sedikit negara yang masih mengalami kesulitan untuk melakukan PBJ yang efektif selama krisis. Pada bulan Juli, diperkirakan dana senilai setidaknya \$100 miliar dolar telah dibelanjakan untuk PBJ terkait pandemi.¹ Pertanyaannya, seberapa jauh dana yang digunakan itu memberikan manfaat kepada masyarakat?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Open Contracting Partnership dan Hivos² meluncurkan Program Penelitian Tindakan COVID-19, yang mendukung 12 tim penelitian di Argentina, Ekuador, Filipina, Kolombia, Georgia, Guatemala, Kenya, Lithuania, Nepal, Nigeria, Paraguay, dan Uruguay dalam menganalisis dan memahami implementasi PBJ kondisi darurat untuk merespons pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keadilan, integritas, dan pemerataan PBJ pemerintah.

Pengumpulan data mengenai PBJ darurat dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus 2020. Para peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan, mewawancarai pemangku kepentingan, membandingkan tren harga historis dari alat pelindung diri (APD), menilai keselarasan praktik dan sistem PBJ dengan standar praktik terbaik, dan membuat perangkat yang dibutuhkan untuk mempelajari kesepakatan dalam PBJ pemerintah atau untuk mengidentifikasi penyedia yang paling layak.

Secara keseluruhan, para peneliti menganalisis lebih dari 1.355.000 perjanjian PBJ. Laporan ini menyajikan cakupan, temuan, dan rekomendasi dari pelbagai proyek penelitian di atas. Laporan ini juga menyampaikan temuan secara umum dan

¹ Global Public Procurement Spend 2020.

www.open-contracting.org/news/12-6-trillion-of-public-procurement-spend-each-year-is-opaque

² Hibah penelitian, the Action Research Grants, disediakan melalui kolaborasi dengan program Open Up Contracting dari Hivos. Pendanaan tambahan disediakan melalui proyek OCP bersama BHP Foundation, Chandler Foundation, dan DFID.

rekomendasi terkait enam topik penting untuk memperbaiki praktik PBJ dalam keadaan darurat, serta rangkuman pembelajaran dari masing-masing proyek penelitian.

2 Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menemukan bahwa mekanisme PBJ darurat memang mempercepat proses pengadaan, tetapi juga secara signifikan menurunkan aspek kehati-hatian, sehingga risiko terjadi kesalahan dalam PBJ turut meningkat. Risiko ini semakin tinggi mengingat rendahnya konsistensi dan ketersediaan data mengenai PBJ darurat pada waktu data dibutuhkan, sedikitnya informasi dan pemahaman mengenai kemampuan penyedia untuk memenuhi komitmennya, dan mekanisme partisipasi yang tidak efektif atau tidak ada sama sekali. Untuk penelitian yang berlangsung di negara-negara yang membuka data PBJ pemerintahnya, seperti di Paraguay, penelitian dapat merekomendasikan perangkat berbasis bukti untuk mengatasi potensi masalah dalam PBJ yang menggunakan mekanisme darurat.

Dari 12 penelitian, ditemukan poin-poin utama berikut:

Faktor risiko dalam PBJ darurat meliputi harga-harga barang darurat yang tinggi dan fluktuatif serta tingginya partisipasi penyedia 'palugada' (satu perusahaan berbagai jenis pasokan), atau perusahaan yang belum pernah terlibat dalam pasar PBJ pemerintah ataupun menjual barang-barang darurat.

Di Georgia, ditemukan 62 kontrak dengan 32 perusahaan yang baru berdiri 6 bulan sebelum pandemi.

Data yang tersedia tentang pengadaan darurat sangat sedikit. Di tujuh negara, data-data tidak disajikan dalam format data terbuka, atau hanya dibuka sebagian. Data baru bisa didapatkan peneliti melalui permohonan informasi, pengumpulan manual, atau metode manual-otomatis di portal-portal PBJ. Di beberapa tempat, PBJ darurat dilaksanakan melalui sistem yang berbeda-beda, sehingga informasi tersebar di beragam sumber data.

Di Kota Buenos Aires, pengumuman penetapan pemenang lelang darurat tertunda antara 11 dan 65 hari.

Mutu data umumnya rendah. Kolom data terkait *item* di dalam kontrak perlu diperbaiki. Misalnya, untuk mengetahui jumlah unit APD yang dibeli, kemasan barang (mis. 500 unit masker dibandingkan dengan satu kotak berisi 500 masker), dan harga per unit barang, peneliti harus mencari informasi secara manual pada dokumen kontrak atau portal pengadaan.

Contoh perjanjian pengadaan masker di Guatemala menunjukkan ada 63 deskripsi berbeda untuk pengadaan masker oleh berbagai lembaga.

Kesempatan penyedia memenangkan kontrak meningkat jika menjadi penyedia terdaftar. Penelitian di Georgia dan Buenos Aires menemukan bahwa, pada masa darurat, lembaga pemerintah yang melakukan pengadaan mengandalkan penyedia yang pernah memenangkan lelang atau yang sudah terdaftar sebelum keadaan darurat terjadi.

Mekanisme umpan balik yang rumit atau sekadar formalitas menurunkan minat partisipasi. Peningkatan transparansi dan penyediaan mekanisme partisipasi saja tidak cukup untuk menjamin keterlibatan penuh dari para pengguna sistem PBJ di masa darurat. Di Lithuania, diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terbukti efektif untuk mendapatkan saran tentang penyiapan PBJ pemerintah yang transparan dan efisien untuk menghadapi kemungkinan gelombang kedua wabah COVID-19.

Dengan data PBJ pemerintah yang terbuka, sarana dan metodologi yang berbasis data dapat dibuat. Beberapa penelitian membuat sarana dan metodologi penyusunan data, seperti sistem indeks, untuk membantu pemerintah mengidentifikasi penyedia yang paling tepat untuk tender tertentu; platform yang interaktif untuk memahami kontrak darurat, membandingkan harga historis, dan penyedia; indeks risiko korupsi untuk mengidentifikasi penyedia mencurigakan; metodologi untuk mengukur efek pemantauan warga secara langsung pada PBJ pemerintah; dan metode untuk membandingkan unit harga yang bisa memperbaiki pengambilan keputusan dalam proses membeli barang/jasa.

Rangkuman Rekomendasi

Buka **semua data tentang kontrak PBJ dalam kondisi darurat**, sajikan dalam format terbuka dan terstruktur. Data perlu meliputi kolom-kolom (*fields*) data yang khusus menandai kontrak pengadaan terkait COVID-19 dan informasi terperinci tentang barang yang dibeli beserta jumlahnya.

Buka **informasi tentang penyedia** seperti riwayat kontraknya, kegiatan usaha di sektor yang relevan, dan pemilik manfaat. Buat sistem register penyedia dan sederhanakan proses registrasi agar partisipasi dalam sistem PBJ pada masa

pemulihan wabah bisa meningkat.

Utamakan **koordinasi dan pusatkan pengadaan** untuk melihat dan mencegah kesenjangan harga dalam PBJ di masa depan. Dengan transparannya informasi pemesanan barang, kontrak payung dan metode pengadaan kompetitif lainnya bisa dilakukan menggantikan PBJ langsung dalam kondisi darurat. Kalaupun terdapat sistem-sistem yang berbeda, sistem-sistem ini seharusnya dapat saling terkait.

Buat **dokumen tender standar** dan persyaratan standar lainnya untuk barang atau prosedur darurat tertentu, dan buat daftar harga acuan.

Ubah **peraturan PBJ pemerintah** dan mandat lain yang bisa menghambat transparansi.

Buat **strategi pengembangan kapasitas** dan pemberian dukungan teknis kepada penyedia untuk meningkatkan partisipasi di dalam PBJ.

Ciptakan **ruang partisipasi yang bermakna** bagi pemangku kepentingan di luar pemerintah, termasuk warga. Saluran komunikasi harus lebih efektif dan **mekanisme pelaporan/pencarian informasi** harus jelas.

3 Temuan dan Rekomendasi

Potensi risiko dalam PBJ pemerintah pada keadaan darurat

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi potensi risiko dalam PBJ pemerintah pada keadaan darurat yang dapat menimbulkan inefisiensi, kesalahan belanja anggaran, dan korupsi.

- **Pada keadaan darurat, harga menjadi lebih tinggi, selisih harga lebih besar, dan ada unsur ketidakpastian:** Analisis menunjukkan bahwa pada keadaan darurat harga barang tertentu (seperti masker, sarung tangan, ventilator, termometer, alkohol gel, dan tempat tidur rumah sakit) menjadi lebih tinggi dibandingkan rata-rata historisnya (Buenos Aires, Ekuador, Guatemala, dan Paraguay), terlepas dari metode pengadaan yang digunakan. Di Buenos Aires, harga rata-rata 13 dari 16 jenis barang yang dianalisis lebih mahal pada saat

darurat, dan rentang selisih harga pun lebih luas. Ada pula badan pemerintah yang membeli barang yang sama, pada kurun waktu yang sama, dengan selisih unit harga yang tinggi. Analisis terhadap 27 kontrak pengadaan masker N95 di Guatemala menemukan bahwa harga naik 8,8 kali lipat pada masa pandemi dibandingkan harga rata-rata biasanya. Di Ekuador, harga rata-rata masker pada 2020 10 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

- **Penyedia 'palugada':** Di Kolombia, 30% penyedia yang mendapatkan kontrak PBJ pada masa pandemi merupakan perusahaan multilayanan, yaitu penyedia yang menyediakan beragam jenis barang dalam suatu waktu. Perusahaan-perusahaan ini dianggap lebih berisiko menyediakan barang dan jasa bermutu rendah kepada masyarakat. Barang dan jasa utama untuk penanggulangan wabah COVID-19 memang disediakan oleh perusahaan yang relatif spesialis di bidangnya, tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hampir 20% pemerintah daerah memberikan kontrak kepada perusahaan yang secara umum dapat disebut sebagai penyedia multilayanan.
- **Penyedia tidak berpengalaman:** Di Georgia, separuh dari nilai seluruh kontrak PBJ pada masa pandemi dalam kurun 22 Maret hingga 30 Juni 2020 diserap oleh perusahaan yang belum pernah punya pengalaman dalam pasar PBJ pemerintah. Dari proporsi itu, 5% nilai kontrak diserap oleh 32 perusahaan yang didirikan enam bulan sebelum pandemi dan delapan perusahaan yang didirikan antara 2 Maret dan 1 Mei 2020. Di Guatemala, salah satu penyedia utama masker N95 adalah perusahaan konstruksi. Meski tanpa pengalaman menjual barang jenis ini, penyedia memasang harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata.
- **Proses PBJ tidak efisien:** Penelitian di Filipina menemukan bahwa rata-rata tingkat penetapan pemenang tender dari Januari hingga Juni 2020 adalah sekitar 17,31%. Pada bulan Maret, terjadi perubahan kebijakan sehingga PBJ terkait COVID-19 dimasukkan ke dalam kategori *Negotiated Procurement* (Kasus Darurat). Tingkat penetapan pun naik ke 47,11%, tetapi masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi mengakibatkan pemerintah kesulitan menggunakan dana PBJ.

Rekomendasi

Utamakan koordinasi pembelian dan pembelian terpusat agar perbedaan harga

bisa dikenali dan dicegah dalam pembelian berikutnya. Selain itu, kontrak payung dan metode pengadaan yang kompetitif lainnya disarankan digunakan alih-alih pengadaan langsung.

Informasi penyedia terkait riwayat kontraknya, kegiatan usaha, latar usaha, dan pemilik manfaat perusahaan perlu dibuka. Informasi tentang penyedia penting agar potensi risiko korupsi bisa dideteksi dan diukur. Bentuk risiko ini, misalnya, keberadaan penyedia multitalangan, pengalaman perusahaan, jenis barang dan jasa yang sanggup disediakan perusahaan, dan kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Buat dokumen tender yang standar dan standar persyaratan untuk barang darurat atau prosedur PBJ tertentu. Penelitian di berbagai tempat menemukan tidak adanya pedoman kriteria teknis tentang barang dan jasa yang dibutuhkan. Persyaratan standar sangat disarankan agar PBJ yang tidak optimal atau harga barang yang terlalu tinggi bisa dihindari. Definisi “PBJ darurat” juga perlu dilihat kembali untuk mengetahui apakah prosedur PBJ yang di luar kebiasaan bisa atau tidak bisa diterima pada tahap tertentu dalam keadaan darurat.

Buat daftar harga acuan sebagai rujukan pembelian di masa mendatang. Dengan menggunakan data terbaru dan historis, lembaga yang melakukan PBJ perlu membuat daftar harga acuan dari barang-barang darurat agar bisa menghasilkan keputusan pembelian yang lebih baik.

Ketersediaan data terkait PBJ pemerintah dalam situasi darurat

Ketersediaan data pengadaan yang terbuka dan terstruktur tentang PBJ pada situasi darurat akan memudahkan penggunaan data, kegiatan penelitian, dan pemecahan masalah yang berbasis bukti. Sebanyak lima tim peneliti (Uruguay, Kolombia, Ekuador, Buenos Aires, dan Paraguay) melakukan analisis menggunakan data pengadaan terbuka yang disediakan sesuai dengan Open Contracting Data Standard (OCDS), sementara peneliti dari Filipina menggunakan data pengadaan terbuka, meski tidak mengikuti format OCDS.

Selain itu, data pengadaan yang terstruktur, terbuka, dan memiliki data historis memungkinkan analisis data menggunakan beragam metode, sehingga bisa menyajikan konteks tentang PBJ dalam keadaan darurat. Tim peneliti dari Buenos Aires dan Paraguay, misalnya, menggunakan data OCDS untuk menganalisis riwayat harga dari

barang-barang yang paling sering dibeli pada masa pandemi. Sementara itu, dengan menggunakan data historis penyedia yang diterbitkan di OCDS, tim peneliti di Kolombia membuat indeks risiko korupsi perusahaan multilayanan saat pandemi. Di Ekuador, data pembelian barang dan jasa pada masa pandemi sudah diterbitkan di OCDS, tetapi data historis harga untuk beberapa jenis barang masih harus dihimpun secara manual dari salah satu platform pengadaan.

Lebih jauh, penggunaan sumber-sumber data publik lainnya untuk menunjang data pengadaan nyatanya sangat berguna. Misalnya, peneliti juga mengumpulkan data tentang pendapatan pemerintah daerah dan daftar penyedia barang dan jasa yang didiskualifikasi dan pernah dikenai sanksi.

Namun, di beberapa situasi, data PBJ darurat tidak dibuka dalam format data terbuka atau hanya dibuka secara parsial, sehingga peneliti harus mengajukan permohonan mendapatkan informasi ke badan pemerintah (Guatemala dan Lithuania), mengumpulkan data secara manual (Georgia, Nepal), atau menggunakan metode semi-otomatis dengan mencari data di portal-portal pengadaan (Buenos Aires). Di beberapa negara, PBJ darurat dilakukan melalui sistem-sistem pengadaan yang terpisah, sehingga keberadaan informasi pun tersebar. Bagi pengguna data, proses ini menunda ketersediaan informasi, bahkan dapat membatasi cakupan analisis karena keterbatasan dalam pengumpulan data. Dengan demikian, adanya data terbuka yang terstruktur sangat penting.

Di luar Paraguay dan Guatemala, negara-negara lain yang diteliti tidak memiliki penanda (*tag*) khusus untuk mengidentifikasi secara akurat kontrak-kontrak PBJ terkait COVID-19. Umumnya, untuk mengetahui PBJ darurat, peneliti harus menggunakan kata kunci dan rentang tanggal tertentu sebagai filter pencarian informasi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan peraturan dan perundang-undangan yang memandatkan publikasi kontrak dalam situasi darurat pada praktiknya tidak selalu diikuti dengan keterbukaan (Kenya), atau terbuka tetapi tertunda (Buenos Aires). Ada pula negara yang kerangka hukumnya justru tidak mendukung transparansi (Kolombia dan Kenya). Terakhir, di Nigeria, penelitian menemukan sistem dan platform untuk membuka informasi PBJ dalam keadaan darurat sudah tersedia, tetapi kesadaran publik perlu dibangun dan platform pun perlu dibuat lebih ramah pengguna agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Rekomendasi

Buka data lengkap tentang kontrak PBJ darurat dalam format terbuka dan terstruktur. Selain itu, publikasi data disarankan menjadi bagian dari mandat peraturan dan peraturan yang sudah memandatkan keterbukaan PBJ darurat perlu ditegakkan. Di negara-negara yang sudah membuka data PBJ darurat hingga batas tertentu, pemerintahnya perlu berupaya mengizinkan publik dapat mengakses dan menggunakan ulang data secara bebas. Data perlu dipublikasikan dalam format yang bisa dibaca mesin dan meliputi informasi lengkap tentang tahap pelaksanaan kontrak.

Kontrak PBJ darurat perlu ditandai. Sistem PBJ perlu menyertakan kolom identifikasi kontrak PBJ darurat terkait COVID-19 agar pembelian darurat dapat diketahui dengan benar dan efisien.

Pusatkan pembelian ke satu sistem atau pastikan sistem-sistem berbeda saling terhubung. PBJ disarankan agar dipusatkan ke satu sistem PBJ elektronik (seperti di Buenos Aires), atau sistem-sistem yang berbeda perlu dipastikan saling terhubung (seperti di Georgia, Kenya, dan Nigeria) agar tercipta basis data PBJ yang seragam. Selain itu, sistem perlu menyertakan badan tertentu, seperti badan usaha milik negara (Kolombia), untuk memastikan kontrak BUMN juga dibuka.

Ubah peraturan PBJ pemerintah dan mandat lain yang bisa menghambat transparansi. Tumpang tindih peraturan tentang publikasi data PBJ perlu diluruskan. Penelitian dalam proyek ini menemukan tumpang tindih peraturan di beberapa negara, seperti misalnya di Kenya, di mana harmonisasi peraturan bisa menguatkan mandat keterbukaan PBJ pemerintah. Di Kolombia, misalnya, disarankan agar pemerintah membuat dan menegakkan peraturan yang bertujuan mengendalikan metode PBJ khusus, yang dikenal dengan Rezim Khusus yang saat ini tidak transparan.

Mutu data dari jenis barang dan jasa

Meskipun data yang terbuka dan terstruktur sudah tersedia, penelitian menunjukkan bahwa perincian data terkait jenis barang yang diadakan perlu diperbaiki. Tujuannya adalah agar perbandingan yang akurat terhadap unit harga barang yang dibeli pada masa pandemi (dan pada situasi lain) dapat dilakukan. Sebagai contoh, untuk mengetahui secara tepat jumlah unit barang yang dibeli (misalnya, “500 unit masker” vs. “satu kotak isi 500 masker”), peneliti harus mencari informasi secara manual pada dokumen kontrak atau pada portal pengadaan. Ada kalanya, kode barang tidak digunakan, sehingga jenis barang ditemukan ditulis berulang kali dalam deskripsi

pengadaan. Di Guatemala, misalnya, terdapat 63 jenis deskripsi 'masker wajah' dari badan-badan yang berbeda. Lebih jauh, kode barang, walaupun tersedia, tidak selalu digunakan dengan konsisten (Georgia).

Standardisasi data jenis barang juga berguna bagi instansi penyelenggara PBJ yang ingin menghitung harga acuan berdasarkan pembelian di masa lampau. Permintaan ini muncul dalam penelitian di Uruguay.

Rekomendasi

Tingkatkan perincian data barang yang dibuka. Data barang perlu diperinci. Satuan barang, kuantitas, jenis kemasan, atau bentuk obat yang dibeli perlu disebutkan. Disarankan agar skema klasifikasi barang (seperti UNSPCS, CPV) digunakan secara konsisten.

Register penyedia

Penelitian di Buenos Aires dan Georgia menemukan bahwa instansi penyelenggara PBJ pada masa darurat cenderung mengandalkan penyedia yang pernah memenangkan tender, atau sudah terdaftar di dalam sistem pengadaan sebelum situasi darurat terjadi. Temuan di Buenos Aires menunjukkan bahwa terdaptarnya penyedia meningkatkan kesempatan suatu perusahaan untuk memenangkan proyek, termasuk dalam keadaan darurat.

Rekomendasi

Register penyedia harus mutakhir dan proses registrasi perlu disederhanakan. Dengan adanya data penyedia terdaftar, penyedia yang tepat bisa ditemukan dengan lebih cepat, partisipasi meningkat, dan ada saluran komunikasi yang jelas dengan pelaku usaha. Proses registrasi pun perlu dibuat sederhana dan digital. Badan-badan pemerintah didorong untuk berkoordinasi dalam rangka pengumpulan data.

Susun rencana pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis untuk penyedia agar penyedia baru tetap berminat berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan lain yang lebih kompetitif setelah krisis COVID-19 berakhir.

Mekanisme partisipasi

Penelitian menunjukkan bahwa upaya menghadirkan transparansi dan keberadaan mekanisme partisipasi tidak cukup untuk menjamin pelibatan penuh pemangku kepentingan dalam pengadaan pada situasi darurat. Di Kenya, warga diundang memberikan masukan untuk rancangan peraturan, tetapi tidak semua usulan diakomodasi. Di Nigeria, penelitian kualitatif terhadap pengguna sistem dan pejabat pemerintah menemukan bahwa kesadaran untuk melakukan pemantauan dan kesadaran tentang mekanisme partisipasi perlu dibangun di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat luas. Aplikasi dan sistem yang sudah ada pun perlu dioptimalkan agar lebih mudah dioperasikan. Di Uruguay, tim peneliti melakukan eksperimen pemantauan warga terhadap sistem pengadaan di negara itu dan menemukan hambatan besar dalam hal menghubungi petugas pengadaan; kolom data yang mengandung informasi kontak bermasalah, tidak mutakhir, atau tidak terhubung ke petugas yang bertanggung jawab atas pengadaan atau menjawab pertanyaan.

Penelitian di Lithuania mengungkap bahwa partisipasi publik bisa meningkatkan mutu PBJ pemerintah. Sebagai bagian dari kegiatan penelitian, dilaksanakan diskusi yang mengundang pemangku kepentingan dari beragam latar belakang. Hal ini terbukti efektif untuk mendapatkan rekomendasi bagi penyiapan PBJ pemerintah yang transparan dan efisien untuk menghadapi kemungkinan gelombang kedua COVID-19.

Rekomendasi

Ciptakan ruang agar aktor non-pemerintah dan warga bisa berpartisipasi secara bermakna. Disarankan agar kewajiban melibatkan aktor selain peserta lelang dan pejabat publik dimasukkan ke dalam peraturan, atau mandat yang ada diperluas untuk mencakup aktor lainnya.

Gunakan media sosial atau saluran komunikasi lain untuk berinteraksi dengan pengguna sistem. Tak hanya itu, platform dan sarana daring seharusnya memberikan pengguna sistem kesempatan untuk melapor jika ada masalah, sebagai bagian dari monitoring pengadaan. Materi visual, seperti video yang menjelaskan cara

kerja platform dan format data yang lebih dikenal masyarakat, seperti *spreadsheet* (MS Excel), disarankan disediakan agar platform bisa diakses oleh pengguna awam.

Pastikan ada mekanisme bertanya dan melapor. Disarankan ada mekanisme komunikasi yang aktif dan jelas untuk pengguna sistem dan tersedia informasi kontak yang masih berlaku dari petugas yang bertanggung jawab menanggapi pertanyaan pengadaan di semua tahapannya. Untuk platform dan perangkat pengadaan, disarankan agar platform memiliki fitur daring yang efektif untuk bertanya dan melapor.

Pengambilan keputusan dan pemantauan pengguna sistem PBJ yang berbasis data

Beberapa penelitian mengajukan solusi dan metodologi yang bertumpu pada data untuk memperbaiki kegiatan pengadaan dalam keadaan darurat atau mengembangkan kegiatan pemantauan. Di Filipina, pemerintah daerah menggunakan sistem indeks untuk menemukan penyedia yang paling cocok untuk tender tertentu. Cara ini pun bisa dicoba di tempat lain, terutama dalam konteks pemerintah daerah. Di Paraguay, platform interaktif membantu pengguna menganalisis kontrak pada keadaan darurat, membandingkan data secara historis, dan mempelajari informasi tentang penyedia yang memenangkan tender. Tim peneliti di Uruguay bereksperimen untuk mengukur dampak pemantauan langsung warga terhadap PBJ pemerintah; cara ini berpotensi diterapkan di tempat lain dengan strategi pemantauan yang berbeda. Sementara itu, tim di Kolombia membuat metodologi untuk menyusun Indeks Penyedia Multilayanan, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi penyedia berisiko berdasarkan data historis dan jenis barang yang disediakan. Di Argentina, Guatemala, Ekuador, dan Uruguay, peneliti menunjukkan bahwa perbandingan unit harga bisa membantu memperbaiki proses pengambilan keputusan pembelian.

4 Temuan dari Berbagai Negara

Kota Buenos Aires, Argentina

Belanja pemerintah pada masa darurat COVID-19: analisis data pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Buenos Aires

Peneliti: Félix Pedro Penna

Tautan [laporan lengkap \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

Ringkasan

Pada 16 Maret 2020, lima hari setelah Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi, Pemerintah Kota Buenos Aires (Pemkot BA) mengumumkan status darurat kesehatan dalam rangka menghentikan persebaran virus di ibu kota Argentina ini. Langkah mengumumkan status darurat pun segera diikuti dengan disusunnya pelbagai strategi untuk mencegah penularan sekaligus kebijakan untuk memperkuat sistem kesehatan setempat. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan pembelian persediaan medis esensial adalah salah satu fungsi pemerintahan yang paling terdampak. Instansi penyelenggara PBJ, baik di kalangan pemerintah maupun swasta, mulai bersaing untuk mendapatkan barang dan jasa yang dianggap penting. Hal ini terjadi tidak hanya di lingkup kota, tetapi juga nasional, bahkan internasional.

Pada bulan-bulan awal pandemi, Pemkot BA menerbitkan informasi secara daring tentang proses PBJ dari berbagai badan pemerintah. Informasi tersedia di beberapa laman situs yang bisa diakses tanpa biaya. Dalam penelitiannya, Félix Pedro Penna bertujuan menganalisis informasi ini dan mengambil data lain yang terkait dengan keadaan darurat dari sumber-sumber informasi yang tidak terstruktur. Secara khusus, penelitian hendak memeriksa kualitas, format, dan struktur informasi yang dipublikasikan; mempelajari cakupan informasi dari sudut pandang transparansi, dan melihat potensi manfaat penelitian bagi peneliti lain dan pengambil keputusan. Penelitian juga mendeskripsikan partisipasi penyedia dalam proses pengadaan. Penyedia dikelompokkan berdasarkan metode PBJ yang digunakan pemerintah, kemudian keberagaman penyedia yang berpartisipasi dan peluang yang tersedia bagi perusahaan baru dianalisis. Terakhir, penelitian membandingkan harga-harga barang

penting pada masa pandemi dengan harga-harga barang yang sama “pra-pandemi”. Berdasarkan temuan, penelitian mengajukan rekomendasi bagi badan Pemkot BA yang terlibat dalam PBJ. Penelitian juga memberikan panduan agar sistem PBJ pemerintah dapat beroperasi lebih efisien, berbasis data, lebih bijaksana dalam menggunakan sumber-sumber publik, dan membuka kesempatan bagi pelaku usaha setempat.

Data dan metodologi

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data berikut:

- Data pengadaan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem elektronik Buenos Aires Compras (BAC) dan diterbitkan menggunakan Open Contracting Data Standard (OCDS)
- Data tentang pengadaan dalam keadaan darurat, diambil dari Berita Negara Kota Buenos Aires
- Data tentang pengadaan dalam keadaan darurat yang dilaksanakan di luar sistem BAC, diambil dari [situs terpisah](#)

Secara keseluruhan, penelitian menganalisis 1.517 kontrak pengadaan antara tahun 2018 dan 2020.

Analisis dibagi menjadi tiga bagian:

- **Transparansi dalam publikasi data**
- **Analisis penyedia dalam keadaan darurat** untuk menentukan keberagaman penyedia yang memenangkan lelang untuk 28 jenis barang terkait pandemi, dibandingkan dengan kontrak sebelum keadaan darurat (Januari 2019 hingga Maret 2020) dan selama keadaan darurat (11 Maret hingga 31 Mei 2020).
- **Analisis harga jenis-jenis barang yang sering dibeli** untuk menentukan unit harga 12 jenis barang penting dalam keadaan darurat, dengan perbandingan harga pada masa sebelum keadaan darurat (Januari 2018 hingga 10 Maret 2020) dan setelah keadaan darurat ditetapkan (11 Maret 2020 hingga 30 Juni 2020). Harga disesuaikan dengan inflasi dan distandarkan.

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Data dan transparansi	<p>Nama penyedia yang ditetapkan melalui pengadaan langsung³ diumumkan rata-rata 11 hari setelah penetapan dan yang terlama adalah 65 hari setelah penetapan. Informasi tentang realisasi belanja menggunakan tata cara PBJ dalam keadaan darurat dilakukan rata-rata 61 hari setelah kontrak difinalisasi, dengan durasi terlama adalah 190 hari. Secara hukum, tidak ada kewajiban bagi badan pemerintah untuk menerbitkan informasi tender untuk PBJ langsung atau PBJ dalam keadaan darurat. Badan pemerintah hanya wajib mengumumkan nama penyedia, tetapi kewajiban ini tidak diberikan tenggat.</p>	<p>Pengumuman terkait pengadaan langsung dan pengadaan dalam keadaan darurat perlu dijadikan bagian dari mandat. (Lihat "Contratación directa simplificada con difusión posterior" dari DNCP di Paraguay). Informasi lengkap dan dokumen pengadaan dalam keadaan darurat perlu disajikan sebagai data terbuka (sebagaimana dicantumkan di dalam perundang-undangan).</p>
	<p>Terdapat dua sistem pengadaan berbeda yang digunakan untuk pengadaan dalam keadaan darurat. Penataan data dan kolom-kolom data di dalam kedua sistem berbeda. Data yang disampaikan di situs resmi Kota Buenos Aires mengenai kontrak darurat terkait COVID-19 tidak lengkap; data yang dibuka tidak sebanyak sumber data lainnya (dataset OCDS, Berita Resmi Pemerintah, dan portal pengadaan).</p>	<p>Sistem pengadaan elektronik BAC perlu digunakan untuk semua pembelian pemerintah di kota Buenos Aires, termasuk pembelian dalam keadaan darurat.</p> <p>Tingkatkan ketersediaan informasi kontrak terkait COVID-19 dengan memasukkan informasi dari Berita Resmi Pemerintah dan dokumen PDF lainnya ke portal pengadaan.</p>
Keragaman penyedia	<p>Berdasarkan analisis terhadap jenis-jenis barang dari 27 pasar, ditemukan bahwa penyedia cukup beragam. Secara rata-rata,</p>	

³ Dalam teks bahasa Inggris: "direct procedure". Mengingat bagian ini adalah ringkasan laporan penelitian, definisi "direct procedure" tidak dicantumkan. Terjemahan "pengadaan langsung" tidak untuk dipersamakan dengan "penunjukan langsung" atau "pengadaan langsung" sebagaimana dirumuskan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 dan amendemennya, Perpres No. 12 tahun 2021. Pembaca disarankan merujuk ke laporan penelitian lengkap untuk mengetahui lebih jauh tentang rumusan konseptual yang digunakan peneliti.

	<p>setiap pasar memiliki 6,8 penyedia sebelum masa darurat dan 4,6 penyedia pada masa darurat.</p>	
	<p>Persyaratan penyedia menurut tata cara PBJ dalam keadaan darurat lebih sedikit dibandingkan pengadaan yang dilakukan melalui BAC, sehingga PBJ lebih sederhana dan bisa menarik penyedia baru.</p>	<p>Sederhanakan proses pendaftaran penyedia baru. Terapkan komunikasi yang jelas dan responsif dengan calon penyedia yang potensial.</p>
	<p>Namun, keragaman penyedia tidak berarti jumlah penyedia baru bertambah: di 19 dari 27 pasar, 75% penyedia sudah pernah mendapatkan kontrak pemerintah.</p>	<p>Tingkatkan mutu register penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat dataset berisi penyedia potensial yang ada di kota. Sertakan informasi kegiatan usaha. Berkoordinasi dengan badan pemerintah lainnya untuk mengumpulkan informasi ini. • Dorong agar penyedia potensial terdaftar di dalam sistem RIUPP. • Proses registrasi dibuat digital.
	<p>Menjadi penyedia terdaftar membantu membuka kesempatan perusahaan baru mendapatkan kontrak pertamanya. 9 dari 15 penyedia baru sudah terdaftar. Meski demikian, dalam PBJ pada keadaan darurat, penyedia tidak wajib terdaftar.</p>	
Variasi harga	<p>Berdasarkan analisis, harga median dan harga rata-rata 13 dari 16 jenis barang lebih mahal pada saat darurat dibandingkan sebelum keadaan darurat. Sebaran harga lebih luas pada masa darurat dan ditemukan lebih banyak titik harga ekstrem.</p>	<p>Eratkan koordinasi dengan instansi lain yang juga melaksanakan pengadaan untuk mengenali dan mencegah selisih harga yang terlalu jauh.</p> <p>Upayakan pembelian terpusat untuk mencegah selisih harga.</p>
	<p>Pada masa darurat, baik metode pengadaan kompetitif maupun tidak kompetitif menelan biaya yang lebih tinggi. Artinya, metode pengadaan langsung tidak serta merta menurunkan harga. Hal yang sama berlaku untuk skema kontrak payung (<i>Framework Agreements</i>) dan Perintah Pemesanan Tertutup (<i>Closed Purchase Orders</i>).</p>	<p>Gunakan data internal untuk menghitung harga acuan dan informasi historis tentang pasar PBJ.</p>

Kolombia

Rancangan dan pengukuran indeks risiko korupsi untuk penyedia dalam konteks keadaan darurat COVID-19

Peneliti: Adriana María Romero Baneto, Camilo Alberto, Enciso Vanegas - Instituto Anticorrupción

Klik untuk membaca [laporan lengkap](#)

Ringkasan

Di tengah krisis COVID-19, peraturan khusus tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah diberlakukan di Kolombia. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa dengan cepat merespons tantangan di bidang sosial dan kesehatan masyarakat yang seketika muncul. Akan tetapi, peraturan khusus ini berpotensi menciptakan ruang diskresi yang lebih luas terkait dengan pemberian kontrak PBJ kepada perusahaan multilayanan, yang mungkin tidak punya kemampuan memadai untuk mengadakan barang dan jasa berkualitas.

Dikembangkan oleh para peneliti di Instituto Anticorrupción, Multipurpose Supplier Index (Indeks Penyedia Multilayanan, selanjutnya disingkat MSI) bertujuan menilai kompetensi perusahaan penyedia barang kepada pemerintah Kolombia setelah status keadaan darurat diputuskan (Keputusan 440/2020), dan keragaman barang yang disediakan perusahaan itu dalam suatu kurun waktu. Berangkat dari hipotesis bahwa perusahaan dengan bidang layanan yang terlalu luas memiliki risiko korupsi lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan bidang usaha yang khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ‘perusahaan multilayanan’ dan menyajikan analisis deskriptif tentang tata cara PBJ dan penetapan pemenang tender sejak 20 Maret 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% dari penyedia barang pemerintah yang sudah berpengalaman mengikuti lelang PBJ bisa digolongkan sebagai perusahaan multilayanan. Pangsa ini naik ke 38% saat analisis disempitkan pada metode pengadaan langsung⁴. Lebih jauh, meskipun barang-barang yang diadakan untuk menanggulangi wabah COVID-19 disediakan oleh perusahaan yang ahli di bidangnya, namun penelitian menunjukkan bahwa 20% pemerintah daerah di Kolombia memberikan kontrak

⁴ Dalam teks bahasa Inggris: “direct contracting procurement method”. Terjemahan “pengadaan langsung” tidak untuk dipersamakan dengan “penunjukan langsung” atau “pengadaan langsung” sebagaimana dirumuskan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 dan amendemennya, Perpres No. 12 tahun 2021. Pembaca disarankan merujuk ke laporan penelitian lengkap untuk mengetahui lebih jauh tentang rumusan konseptual yang digunakan peneliti.

pengadaan kepada perusahaan yang, secara umum, dapat dikategorikan ‘multilayanan’. Hal ini meningkatkan risiko rente dan korupsi di bidang pengadaan pemerintah di Kolombia.

Data dan metodologi

Data yang digunakan dalam analisis adalah data yang diterbitkan oleh badan pengadaan publik Kolombia, Colombia Compra Eficiente (CCE), sesuai dengan Open Contracting Data Standard. Data berisi semua kontrak PBJ pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Kolombia baik di tingkat nasional maupun daerah dalam kurun waktu antara tahun 2012 dan 31 Mei 2020.

Kontrak dibagi ke dalam dua kelompok: kontrak yang ditetapkan sebelum 20 Maret 2020—tanggal dikeluarkannya keputusan tentang keadaan darurat (Keputusan 440/2020)—dan kontrak yang ditetapkan setelah tanggal tersebut.

MSI (*Multipurpose Supplier Index* atau Indeks Penyedia Mutilayanan) bertujuan mengukur sejauh mana perusahaan atau organisasi penyedia terdaftar dapat dianggap sebagai perusahaan multilayanan. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah ragam barang yang disediakan perusahaan ke suatu badan pemerintah dan jeda waktu antara barang dan jasa yang beragam itu disediakan kepada suatu badan pemerintah dalam dua periode tersebut. Nilai yang dimasukkan ke dalam MSI adalah antara 0 dan 1. Nilai 0 dalam indeks adalah nilai untuk perusahaan atau organisasi spesialis yang kontraknya selalu atas pengadaan barang dan jasa yang persis sama, sehingga memiliki risiko korupsi yang lebih rendah. Sebaliknya, nilai 1 dalam MSI merepresentasikan perusahaan multilayanan, yaitu perusahaan yang menyediakan bermacam-macam barang dan jasa kepada pemerintah dan memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi.

Temuan dan rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Metode pengadaan	Penggunaan Rezim Khusus dalam penetapan kontrak PBJ oleh badan-badan pemerintah Kolombia naik setelah Keputusan Keadaan Darurat 440/2020 diberlakukan. 51% kontrak yang dianalisis dalam periode krisis COVID-19 ditetapkan menurut skema ini , sementara 23% kontrak ditetapkan melalui metode pengadaan langsung berdasarkan rezim PBJ pemerintah yang biasanya	Penggunaan Rezim Khusus yang berlebihan untuk PBJ pemerintah di Kolombia menimbulkan pertanyaan besar tentang keefektifan inisiatif transparansi dan keterbukaan informasi PBJ. Sebagian informasi tentang kontrak yang ditetapkan dengan rezim ibarat ‘kotak hitam’ yang harus dianalisis kasus per kasus,

	<p>berlaku (UU 80/1993). Dalam hal transparansi, penggunaan Rezim Khusus menimbulkan kekhawatiran. Rezim ini memiliki peraturan berbeda, yang artinya separuh dari kegiatan PBJ pemerintah di Kolombia yang dilaksanakan pada keadaan darurat tidak bisa dianalisis secara akurat pada tingkat agregat.</p>	<p>bukan secara kolektif. Hal ini menyulitkan mekanisme pengawasan, menurunkan transparansi, dan meningkatkan risiko korupsi. Disarankan agar Colombia Compra Eficiente merumuskan dan memberlakukan peraturan atas penggunaan Rezim Khusus untuk PBJ pemerintah, termasuk aturan untuk membuka justifikasi yang dapat digunakan badan pemerintah yang ingin memanfaatkan Rezim Khusus PBJ Pemerintah.</p>
	<p>PBJ pemerintah atas dasar '<i>Manifest Urgency</i>' atau 'Darurat Nyata' menyumbang 36% dari semua kontrak yang ditetapkan menggunakan metode Pengadaan Langsung dan hanya menyumbang 7% dari nilai total PBJ dengan metode ini. Meskipun lebih kecil dari yang diperkirakan, jumlah kontrak yang sebenarnya dalam kategori 'Darurat Nyata' mungkin tidak dilaporkan, dan sebagian kontrak dikategorikan sebagai Rezim Khusus.</p>	
<p>Transparansi dari badan usaha milik negara (BUMN)</p>	<p>BUMN tidak mendaftarkan proses PBJ-nya di SECOP.</p>	<p>Memo Eksternal No. 20 tanggal 27 Agustus 2015 (diterbitkan oleh Colombia Compra Eficiente) menyatakan BUMN tidak wajib mendaftarkan PBJ-nya di SECOP. Hal ini mengindikasikan tidak ada BUMN dalam sampel yang dianalisis untuk laporan ini. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan seputar transparansi PBJ di BUMN dan pengawasan terhadap dana publik yang membiayai PBJ itu. Disarankan agar Colombia Compra Eficiente mempertimbangkan mekanisme untuk memusatkan semua informasi PBJ BUMN, baik menggunakan SECOP atau cara lain agar informasi itu bisa dihimpun sebagai data terbuka sesuai format OCDS.</p>
<p>Jenis barang yang diadakan</p>	<p>Kontrak yang paling sering ditetapkan setelah keputusan keadaan darurat diterbitkan adalah kontrak untuk barang terkait penanggulangan COVID-19. Sebagaimana disampaikan pada bagian analisis, jenis barang terkait</p>	

	<p>layanan kesehatan, alat medis, makanan, dan obat-obatan adalah barang yang paling sering diadakan, meskipun bukan merupakan kontrak dengan nilai tertinggi. Selain itu, secara umum, penyedia untuk jenis-jenis barang ini adalah perusahaan yang rekam jejaknya menunjukkan mereka sering menyediakan barang dan jasa yang sama kepada badan pemerintah Kolombia.</p>	
<p>Penyedia barang berisiko tinggi</p>	<p>Perusahaan ‘berisiko tinggi’ menyumbang hampir 30% dari semua perusahaan yang dinilai menggunakan MSI. Artinya, jika menang kontrak, kemungkinan perusahaan-perusahaan ini menyediakan barang dan jasa berkualitas rendah untuk masyarakat lebih tinggi, menurut indikator risiko penyedia yang dibuat oleh tim peneliti. Analisis terpilah pada tingkat pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah terpencil lebih mungkin memberikan kontrak kepada perusahaan multilayanan berisiko tinggi, yang skor MSI-nya di atas 0,75.</p> <p>Peneliti menghadapi kendala signifikan dalam mengakses informasi tentang kegiatan usaha para penyedia yang ada di dalam register perusahaan Kolombia, RUES, tetapi tidak dapat diakses oleh publik.</p>	<p>Register publik berisi informasi tentang penyedia barang dan jasa pemerintah dibutuhkan mendesak. Register ini harus menyertakan penyedia yang mendapatkan kontrak melalui metode Pengadaan Langsung dan Rezim Khusus. Informasi yang tercantum meliputi misi perusahaan, kegiatan usaha utama, direksi, dan latar belakang perusahaan. Informasi ini dapat disimpan oleh Colombia Compra Eficiente dalam bentuk data penyedia yang bisa diakses publik di dalam platform SECOP II; pendaftaran penyedia perlu dijadikan syarat bagi perusahaan yang ingin mengakses kontrak pemerintah.</p>

Ekuador

Data pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam keadaan darurat COVID-19: Pelajaran dari Ekuador

Peneliti: Julio López Peña, Martín Loza, Margarita Yépez - Datalat

[Tautan laporan lengkap \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

Ringkasan

Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di Ekuador pada masa krisis kesehatan COVID-19. Tujuan penelitian adalah menyusun rekomendasi mengenai penggunaan Open Contracting Data Standard (OCDS) dan penyediaan data terbuka pada keadaan darurat. Peneliti dari Datalat menemukan bahwa informasi yang diterbitkan oleh lembaga pengadaan Ekuador, SERCOP, sudah selaras dengan OCDS. Namun, beberapa variabel informasi tidak lengkap atau sulit dipahami. Selain itu, meskipun data yang tersedia dapat dianalisis, tetapi peneliti masih harus merujuk data lain yang hanya tersedia di *Sistema Oficial de Contratación Pública* (SOCE) dan tidak dalam format terbuka untuk menganalisis harga historis dari suatu jenis barang. Dengan demikian, ada peluang untuk membangun platform data yang ramah pengguna dan memudahkan pencarian. Penelitian ini menawarkan rekomendasi spesifik mengenai proses pengadaan dan untuk penelitian lain.

Data dan metodologi

Penelitian menggunakan dua dataset dari SERCOP: satu dalam format data terbuka [yang berisi perincian kontrak dan jenis barang yang dibeli](#) dan [dataset kontrak darurat yang mengikuti Open Contracting Data Standard](#). Kedua dataset mengandung informasi nomor prosedur, kontrak, penyedia, jenis barang, dan nilai total kontrak. Secara keseluruhan, sebanyak 18.955 kontrak pengadaan dianalisis oleh penelitian ini.

Selain itu, penelitian memilih empat kategori jenis barang terkait keadaan darurat untuk melakukan analisis harga: APD, cairan pembersih, disinfektan, dan obat-obatan. Keempat jenis barang inilah yang paling sering dan paling banyak diadakan, sehingga dipilih untuk dianalisis. Untuk mendapatkan data harga historis keempat jenis barang sejak 2016, peneliti melakukan pencarian manual di portal *Sistema Oficial de Contratación Pública* (SOCE), yaitu dengan mencari kata-kata kunci tertentu di dalam deskripsi kontrak.

Temuan dan rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
<p>Cakupan/ kelengkapan data kontrak darurat</p>	<p>Dataset kontrak darurat yang diterbitkan mengikuti format OCDS mengandung informasi tentang tiga tahap PBJ pemerintah: tender, penetapan pemenang, dan penandatanganan kontrak. Namun, informasi mengenai pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak tidak ada.</p> <p>Informasi dari sebagian tahap pengadaan tidak diisi dengan lengkap pada kolom data (terutama kolom yang merekam alasan penggunaan rezim darurat), sehingga menyulitkan analisis. Variabel jenis keadaan darurat pun bisa menimbulkan interpretasi berbeda, yang mungkin tidak tepat. Terdapat tujuh jenis keadaan darurat yang diidentifikasi dalam penelitian: kecelakaan, serangan genting dari pihak eksternal, banjir, dan gempa bumi (0,77%); bencana alam (5%); keadaan kahar atau keadaan di luar kendali (69%); dan guncangan berat dalam negeri (25%). Namun, kategori yang sesuai untuk COVID-19 tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.</p>	<p>Tambahkan kolom data untuk tahap pelaksanaan kontrak; saat ini, sistem hanya menyatakan status kontrak (misal: 100% terlaksana). Informasi lebih jauh bisa didapatkan dari SOCE, tetapi data di SOCE tidak disajikan dalam format terbuka.</p> <p>Disarankan agar ditambahkan variabel atau kolom baru bagi pengadaan terkait COVID-19. Hal ini bisa dilakukan, termasuk melalui kolom <i>tender.procurementMethodRationale</i> di OCDS.</p>
<p>Ketersediaan/k emudahan akses terhadap data kontrak darurat</p>	<p>Data terbuka mengenai keadaan darurat mudah ditemukan pada platform dan sudah tersedia dalam format JSON.</p>	<p>Disarankan agar pilihan format unduhan data ditambah. JSON dan variabel lain di dalam OCDS mungkin sulit dipahami oleh pihak lain yang tidak familier dengan OCDS. Tanpa metadata, informasi di JSON dapat sulit dimengerti.</p> <p>Disarankan agar ada materi visual untuk menjelaskan isi platform data terbuka. Video singkat bisa menarik minat pengguna data, menambah pengetahuan, dan meningkatkan pemanfaatan data. Menurut survei Datalat, hanya 41% dari 183 pengguna portal SECOP yang tahu mengenai keberadaan data terbuka untuk</p>

		keadaan darurat.
Ketersediaan data sebelum krisis COVID-19	Informasi yang saat ini tersedia pada portal data terbuka hanya meliputi kontrak yang sudah ditetapkan pada masa darurat COVID-19. SERCOP tidak memiliki data historis yang tersedia untuk diakses publik sebelum keadaan darurat terjadi, sehingga analisis komparatif menjadi rumit dan memakan waktu lama untuk dilakukan. Selain itu, informasi kontrak yang ada pada SOCE harus dicari secara manual.	
Mutu data	<p>Informasi yang diunggah ke SOCE sangat penting bagi penguatan transparansi dan kontrol sosial, tetapi masih ditemukan kesulitan dalam menggunakan SOCE. Sering kali, data tidak dimasukkan ke dalam sistem dengan benar sehingga menghambat analisis dan pengguna harus mencari informasi yang benar dari dokumen lain. Mencari kontrak pun masih harus dilakukan secara manual dan fungsi filter, yang diterapkan atas alasan keamanan, dapat membatasi parameter pencarian informasi.</p> <p>SERCOP telah menerbitkan informasi pada portal data terbuka untuk keadaan darurat, dan sudah mengikuti standar OCDS. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa basis data harus dibersihkan sebelum analisis otomatis dapat dilakukan. Metode terbaik untuk membersihkan data dapat didiskusikan.</p>	SERCOP perlu meninjau ulang secara mendalam basis data yang sudah dipublikasikan. Masalah dalam dataset saat ini, antara lain, adalah dataset mengandung informasi 'null' atau data kosong, informasi tercampur-campur pada kolom data yang tersedia, dan tidak ada standarisasi data. Hal ini menyulitkan pengolahan dan analisis data.
Fluktuasi Harga	Analisis terhadap harga per unit dari empat jenis barang darurat (masker, sarung tangan, gel alkohol, dan parasetamol) antara tahun 2016 dan 2020 menunjukkan bahwa harga rata-rata masker pada 2020 adalah 10x lebih tinggi dibandingkan 2016 , dengan kenaikan harga dimulai pada tahun 2019. Harga sarung tangan lateks pada masa darurat adalah 2,4 kali lebih tinggi	Sangat disarankan agar jenis-jenis barang yang diadakan selama keadaan darurat dikelompokkan, meskipun hanya sebagai percobaan untuk memperbaiki sistem data di kemudian hari. Dalam metodologi penelitian, peneliti mengusulkan empat kategori jenis barang yang diadakan selama keadaan darurat. Namun, kategori ini bisa

	dibandingkan 2019 (dari US\$0,05 per unit menjadi \$0,12). Harga gel alkohol mencapai titik tertinggi pada 2019 dan turun 68% pada keadaan darurat, sementara harga parasetamol 1,8 kali lebih rendah dibandingkan tahun 2016.	disesuaikan agar lebih cocok dengan kebutuhan CPC-SERCOP.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Pengadaan langsung dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 di Georgia

Peneliti: Natalia Baratashvili

[Tautan ke laporan lengkap](#)

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan menganalisis keputusan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ditetapkan oleh Pemerintah Georgia dalam rangka merespons COVID-19 dan mengevaluasi cara badan pemerintah menerapkan metode pengadaan darurat pada masa krisis. Analisis ini mencakup pengadaan sederhana (langsung)⁵ yang terjadi pada kurun 22 Maret 2020 hingga 22 Mei 2020 atas dasar keadaan darurat, beserta kontrak yang disepakati, serta analisis kontrak yang ditetapkan dari 22 Mei hingga 30 Juni 2020. Dataset yang digunakan untuk analisis disusun secara manual berdasarkan informasi yang dihimpun dari sistem pengadaan secara elektronik Pemerintah Georgia, Ge-GP.

Analisis menunjukkan bahwa, secara umum, respons Pemerintah Georgia dan PBJ pemerintah yang terkait dengan upaya respons sangat terpusat. Penelitian ini secara umum menyajikan peta jalan untuk memahami bagaimana kerangka hukum hasil reformasi, platform daring yang komprehensif, dan tata cara resmi untuk menyetujui lelang dalam keadaan darurat membantu mempertahankan efisiensi dan transparansi PBJ pemerintah di Georgia pada masa krisis. Beberapa tantangan perlu disebutkan. Laporan penelitian menyatakan bahwa meskipun platform daring memberikan akses kepada informasi pengadaan yang komprehensif dan andal, tantangan besar muncul dari kelangkaan data yang tersedia dalam format data terbuka. Selain itu, kurangnya informasi tentang COVID-19 dan penyajian data yang dalam beberapa aspek tidak konsisten menjadi hambatan signifikan dalam upaya mendapatkan gambaran PBJ pemerintah secara lengkap. Analisis juga mengungkap bahwa, di tengah situasi darurat, prinsip-prinsip perlakuan yang setara, nondiskriminasi, dan integritas perlu terus ditingkatkan kepada semua badan pelaku pengadaan. Memberikan kontrak kepada

⁵ Dalam teks bahasa Inggris: "simplified (direct) procurement". Terjemahan "pengadaan sederhana (langsung)" tidak untuk dipersamakan dengan "penunjukan langsung" atau "pengadaan langsung" sebagaimana dirumuskan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 dan amendemennya, Perpres No. 12 tahun 2021. Hal yang sama berlaku untuk "direct procurement" (pengadaan langsung), "simplified procurement procedures" (prosedur pengadaan sederhana), dan "simplified procurement requests" (permintaan pengadaan sederhana) di dalam bab ringkasan ini. Pembaca disarankan merujuk ke laporan penelitian lengkap untuk mengetahui lebih jauh tentang rumusan konseptual yang digunakan peneliti.

penyedia yang baru terdaftar atau penyedia tanpa pengalaman dalam PBJ pemerintah, ditambah dengan tingkat kompetisi yang rendah, dapat secara khusus menimbulkan ancaman besar terhadap integritas PBJ pemerintah di Georgia dan rasa percaya secara umum kepada badan pemerintah. Penelitian ini juga menyarankan agar uji “penetapan pemenang lelang dalam keadaan darurat” diubah untuk meminimalkan ruang interpretasi atau ketidakkonsistenan lainnya dalam PBJ yang menggunakan metode pengadaan langsung.

Data dan metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian primer dan sekunder. Untuk penelitian primer kuantitatif, data pengadaan dalam keadaan darurat diperoleh dari [sistem Ge-GP](#) agar peneliti bisa mendapatkan informasi langsung tentang prosedur pengadaan sederhana yang dilaksanakan antara 22 Maret hingga 30 Juni 2020.

Mengingat data yang dapat diunduh sangat terbatas, dataset pun disusun secara manual menggunakan data yang bersumber dari dua modul utama di platform Ge-GP. Modul pertama adalah modul “Requests for Simplified Procurement” (Permohonan Pengadaan Sederhana atau biasa disebut ‘SMP’) yang berisi informasi tentang permohonan yang diajukan unit layanan pengadaan untuk mendapatkan persetujuan Lembaga Pengadaan Pusat. Modul kedua adalah “Contract Management Reports” (Laporan Manajemen Kontrak atau biasa disebut ‘CMR’), yang meliputi kontrak-kontrak yang ditetapkan melalui penunjukan langsung dan detail lainnya seputar pelaksanaan kontrak. Pengumpulan data dilakukan antara 1 Juli dan 31 Juli. Dataset akhir berisi 1137 pengamatan/kasus.

Data dan analisis kuantitatif ditunjang dengan tinjauan kualitatif terhadap permohonan pengadaan dengan metode sederhana dan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pengadaan Nasional Georgia terhadap permohonan itu.

Penelitian sekunder juga meliputi tinjauan terhadap makalah penelitian yang relevan, artikel, dan kajian komparatif. Selain itu, peneliti juga menganalisis undang-undang dan peraturan daerah di Georgia serta materi lain yang terkait yang diterbitkan oleh Lembaga Pengadaan Nasional.

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
<p>Ketersediaan data terbuka</p>	<p>Platform Ge-GP memungkinkan penggunaannya mengakses informasi yang komprehensif, spesifik, tepat waktu, dan andal tentang (hampir semua) keputusan pengadaan, tetapi tidak satu pun data tersedia dalam format terbuka. Portal data terbuka Lembaga Pengadaan Nasional belum menerbitkan informasi apa pun pada tahun 2020.</p>	<p>Pastikan bahwa semua data PBJ pemerintah dimutakhirkan secara teratur pada Portal Data Terbuka Georgia. Publikasikan data menggunakan model sesuai Open Contracting Data Standard yang sudah diakui secara internasional.</p>
<p>Integrasi Data</p>	<p>Data tentang permohonan PBJ metode sederhana dan kontrak yang ditetapkan melalui metode ini tidak terpadu.</p> <p>Terdapat dua modul terpisah di dalam sistem: satu modul untuk proses permohonan dan persetujuan (Permohonan Pengadaan Sederhana atau SMP) dan satu modul untuk pemantauan kontrak PBJ. Modul SMP memiliki informasi terperinci mengenai setiap permohonan. Namun, Laporan Manajemen Kontrak, menemukan data kontrak yang dihasilkan oleh suatu permohonan tidak mudah (kecuali kontrak yang ditetapkan sebelum ada persetujuan, karena dengan begitu kontrak bisa diunggah ke modul SMP oleh badan penyelenggara PBJ).</p>	<p>Pastikan sistem Ge-GP memungkinkan agar semua kontrak yang merupakan hasil PBJ langsung dikaitkan dengan permohonan asalnya.</p>
<p>Penanda untuk PBJ terkait COVID-19</p>	<p>Di dalam Ge-GP, tidak ada opsi untuk memberikan tanda (<i>tag</i>) pada kontrak yang spesifik terkait COVID-19.</p> <p>Permohonan untuk melakukan pengadaan yang disederhanakan memungkinkan unit pengadaan memberikan keterangan alasan penetapan kontrak secara langsung, tetapi</p>	<p>Buat sistem <i>tag</i> di platform Ge-GP untuk menata dan mengatur setiap peristiwa pengadaan menggunakan <i>tag</i> yang sudah ditentukan di awal, termasuk <i>tag</i> untuk pengadaan terkait COVID-19. Dengan begitu, pemerintah bisa</p>

	tidak ada kontrak dengan kaitan langsung ke COVID-19.	memiliki gambaran menyeluruh tentang semua keputusan pengadaan yang diambilnya.
Kode CPV⁶	Kode CPV digunakan, namun tidak konsisten. Badan-badan pemerintah, misalnya, menggunakan setidaknya tiga kode CPV berbeda untuk pengadaan termometer inframerah dan setidaknya empat kode berbeda untuk pengadaan masker. Ada pula badan pemerintah yang menggunakan hanya satu kode CPV untuk satu daftar pengadaan berisi beragam jenis barang. Penggunaan kode yang tidak konsisten sangat menghambat pencarian dan pengumpulan data yang spesifik terkait COVID-19.	Pastikan kode CPV untuk semua informasi PBJ terkait COVID-19 digunakan secara konsisten dan seragam. Dengan mengetahui secara mendalam setiap jenis barang, pekerjaan, atau jasa, unit pengadaan pemerintah punya kendali lebih baik dan pemerintah bisa membuat rencana, memantau, dan merespons masalah dengan lebih efektif. Informasi yang lengkap memungkinkan monitoring terhadap harga, penyedia, dan kondisi lain di pasar per kategori jenis barang/jasa.
Publikasi Kontrak (Badan) Keamanan	Informasi beberapa pengadaan darurat tidak tersedia secara penuh di Ge-GP. Kontrak dengan nilai mulai dari 1.004.353 GEL (\$313.000) tidak dibuka ke publik. Kontrak ini biasanya ditetapkan oleh badan keamanan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, atau badan-badan lain di bawah keduanya, serta Administrasi Pemerintah.	Terbitkan semua keputusan PBJ pemerintah terkait COVID-19, termasuk kontrak darurat yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan badan-badan di bawah keduanya; Administrasi Pemerintah, dan badan lain yang kontraknya saat ini tidak bisa diakses.
Pengalaman penyedia	Pada keadaan darurat, badan pemerintah sangat mengandalkan penyedia yang sudah mapan dan berpengalaman. Sekitar 93% dari nilai total seluruh kontrak darurat diberikan kepada perusahaan yang terdaftar setidaknya	Partisipasi penyedia baru perlu didorong, namun pada bentuk pengadaan lain yang lebih kompetitif pasca COVID-19. Untuk itu, kapasitas dan akses perusahaan kepada informasi

⁶ CPV Code: *Common Procurement Vocabulary Code* / Kode Kosakata Pengadaan Umum merupakan sistem klasifikasi PBJ pemerintah yang dibangun oleh Uni Eropa dengan menggunakan kosakata terstandarisasi untuk membantu pejabat pengadaan mengkalsifikasikan pengumuman kontrak mereka secara konsisten dan untuk memudahkan penyedia dan pihak pemerintah yang berkontrak untuk menemukan pengumuman.

	<p>enam bulan sebelum pandemi terjadi. Namun, separuh dari total nilai kontrak darurat (\$8,3 juta) diberikan kepada perusahaan tanpa rekam jejak di pasar PBJ pemerintah (terlepas dari kapan perusahaan mulai terdaftar, perusahaan yang dimaksud belum pernah memenangkan satu pun lelang pemerintah).</p> <p>Dalam keadaan darurat, ketergantungan yang berlebihan terhadap penyedia baru bisa meningkatkan risiko integritas dan menurunkan kepercayaan kepada sistem PBJ pemerintah, khususnya jika penyedia ditunjuk secara langsung.</p> <p>Dalam periode yang menjadi lokus penelitian, badan-badan pemerintah menandatangani 62 kontrak senilai total 2,7 juta GEL (\$842.000) dengan 32 perusahaan yang didirikan dalam kurun enam bulan sejak pandemi dimulai. Nilai ini merepresentasikan 5% dari total nilai kontrak darurat yang ditetapkan dari 22 Maret hingga 22 Mei. Dari 32 perusahaan, setidaknya delapan perusahaan menjadi penyedia terdaftar antara 2 Maret dan 1 Mei. Para penyedia ini menerima total 976.353 GEL (\$303.000) dari 15 badan pemerintah.</p>	<p>pengadaan yang relevan perlu ditingkatkan (misalnya dengan mengadakan lokakarya, memberikan bimbingan teknis, sosialisasi PBJ pemerintah, menciptakan ruang bagi interaksi yang berkelanjutan).</p> <p>Sempurnakan platform Ge-GP agar dapat mengakomodasi basis data komprehensif berisi informasi lengkap tentang penyedia, seperti lingkup usaha, jenis barang dan jasa yang disediakan, rekam jejak, kontrak, dll.</p> <p>Jajaki peluang untuk menerapkan kontrak payung atau kesepakatan pembelian yang dinamis untuk PBJ terkait COVID-19.</p>
<p>Alasan memilih penyedia</p>	<p>Pada modul Permohonan Pengadaan Sederhana, badan pemerintah memasukkan permohonan PBJ darurat beserta jawaban kuesioner. Pertanyaan kuesioner adalah seputar alasan kedaruratan, jumlah/nilai yang dibutuhkan, harga, dll. Namun tidak ada pertanyaan yang meminta justifikasi tentang penyedia terpilih atau rekam jejak perusahaan. Selain itu, sangat sedikit badan pemerintah yang memberikan</p>	<p>Tambahkan pertanyaan tentang alasan memilih penyedia tertentu dan wajibkan analisis harga dasar, memperhitungkan beberapa penyedia, untuk semua permohonan dan PBJ darurat.</p>

	<p>informasi tambahan mengenai harga PBJ dibandingkan dengan harga pasar. Riset pasar yang menyeluruh memang butuh waktu, sehingga yang setidaknya bisa dan layak dilakukan dalam waktu yang terbatas adalah menganalisis harga beberapa penyedia potensial.</p>	
<p>Persetujuan terhadap permohonan pengadaan dalam keadaan darurat</p>	<p>Terdapat beberapa permohonan PBJ darurat kepada Lembaga Pengadaan Nasional yang tidak memberikan justifikasi yang jelas, terutama permohonan tertanggal bulan Mei dan Juni. Beberapa penetapan kontrak dan jenis barang yang diminta sepertinya tidak mengisi alasan kedaruratan .</p>	<p>Buat pedoman yang terperinci tentang tata cara PBJ darurat yang prosedurnya lebih sederhana. Berikan contoh dari setiap butir persyaratan sesuai yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Berikan rumusan “keadaan mendesak” yang spesifik dan lebih sempit untuk kebutuhan meninjau permohonan PBJ darurat. Imbau unit layanan agar membuat permohonan yang terperinci, terutama mengenai keadaan darurat yang pengadaannya diperbolehkan menggunakan prosedur khusus kondisi darurat.</p>

Guatemala

Analisis pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam keadaan darurat COVID-19 di Guatemala

Peneliti: Daniel de León

[Tautan laporan lengkap \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

Ringkasan

Pada 5 Maret, Pemerintah Guatemala mengumumkan status keadaan darurat akibat pandemi COVID-19. Dengan ditetapkannya status ini, badan pemerintah bisa menggunakan tata cara pengadaan darurat, sebagaimana diatur oleh undang-undang pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah Guatemala. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel de León menganalisis 7.623 prosedur pengadaan dan 6.798 kontrak terkait keadaan darurat untuk periode Maret hingga Juli 2020. Penelitian bertujuan mengetahui penyedia utama, badan pemerintah yang melakukan pengadaan, dan jenis barang yang dibeli. Analisis penelitian menemukan beberapa tantangan utama dalam hal ketersediaan dan mutu data; kemungkinan terjadi kecurangan dalam pembelian masker; dan prosedur PBJ darurat yang kerangka acuan kerjanya tidak standar.

Data dan metodologi

Data di dalam penelitian ini diunduh dari [portal PBJ pemerintah Guatemala "Guatecompras"](#) dan meliputi semua metode PBJ yang ditandai terkait dengan keadaan darurat. Untuk memverifikasi total belanja pemerintah untuk setiap kontrak, data dari portal ditunjang dengan informasi yang disediakan Kementerian Keuangan Guatemala atas permintaan peneliti.

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Data nilai kontrak yang ditetapkan	Data yang diunduh dari Guatecompra tidak memiliki perincian nilai total dari setiap kontrak yang diberikan kepada masing-masing penyedia. Penelitian menggunakan dua kelompok data: satu kelompok berisi daftar tender dan satu kelompok berisi jenis barang yang dibeli	Tambahkan satu lagi kelompok data di dalam portal Guatecompra yang berisi nilai kontrak akurat yang diberikan kepada setiap penyedia. Ketimpangan nilai bisa terjadi karena kesalahan input data yang

	<p>serta penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Kedua kelompok data ini bisa dicocokkan menggunakan penanda (<i>identifier</i>) yang unik untuk setiap unit data. Namun, berdasarkan analisis, 68% dari seluruh tender yang dilakukan memiliki ketimpangan nilai total kontrak yang diberikan kepada penyedia.</p> <p>Untuk mengetahui nilai persis dari kontrak yang diberikan kepada setiap penyedia, pengguna sistem harus mengajukan permintaan informasi kepada Kementerian Keuangan, karena data tidak tersedia dalam format terbuka. Dalam hal penelitian ini, Kementerian Keuangan memerlukan 62 hari untuk menyampaikan informasi yang diminta.</p>	<p>dilakukan secara manual ke dalam sistem. Petugas yang bertanggung jawab atas input data perlu dilatih untuk meminimalkan kesalahan.</p>
<p>Deskripsi jenis barang</p>	<p>Tidak ada standar untuk data jenis barang dan data tidak meliputi kode dan klasifikasi jenis barang. Hal ini menyulitkan analisis harga per unit barang. Contoh: dalam analisis terhadap 848 kontrak pengadaan masker, ditemukan bahwa deskripsi jenis barang memiliki 63 versi berbeda.</p>	<p>Klasifikasi jenis barang, seperti kode UNSPCS, perlu digunakan untuk menstandarisasi pembelian dan memudahkan analisis data oleh peneliti, jurnalis, ataupun pihak lain yang perlu memeriksa data PBJ pemerintah.</p>
<p>Harga masker</p>	<p>Analisis terhadap 27 kontrak pengadaan masker N95 dalam kurun dua tahun terakhir menunjukkan bahwa harga rata-rata pada tahun 2020 lebih mahal 8,8x dibandingkan tahun 2019.</p> <p>Salah satu penyedia terlaris untuk masker pada masa darurat adalah sebuah perusahaan yang utamanya bergerak di bidang material konstruksi. Penyedia ini menjual masker dengan harga tertinggi. Analisis juga menunjukkan bahwa kontrak-kontrak yang didapatkan penyedia ini berasal dari rumah sakit yang sama, dengan beberapa kontrak ditetapkan pada hari yang sama pula. Hal ini mengindikasikan bahwa satu volume pembelian dipecah menjadi beberapa paket yang lebih kecil dengan nilai lebih rendah, untuk menghindari keharusan mengadakan lelang yang lebih kompetitif.</p>	<p>Tinjau ulang spesifikasi tender dan rumuskan persyaratan standar jenis-jenis barang tertentu dengan lebih akurat. Saat ini, tidak ada panduan yang jelas mengenai kriteria teknis dari barang yang diadakan. Artinya, unit-unit pengadaan bisa meminta dan menetapkan kontrak menggunakan kriteria yang menurut mereka relevan.</p> <p>Badan audit (mis. <i>Comptroller General</i>, pejabat tertinggi badan audit) perlu menetapkan daftar barang esensial terkait pengadaan sebagai acuan dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pengadaan dan potensi pelanggaran.</p>

	Disebutkan bahwa alasan memberikan kontrak dalam nilai tinggi kepada penyedia tertentu adalah karena penyedia itulah yang memenuhi spesifikasi tender.	
Keterbukaan tentang harga per unit barang	Analisis terhadap kontrak pembelian air menemukan bahwa harga per unit barang tidak disebutkan di dalam kontrak. Hal ini berlawanan dengan Pasal 6 UU Pengadaan Guatemala (<i>Ley de Contrataciones</i>)	

Kenya

Ketahanan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kenya

Peneliti: Timothy Kiprono

[Tautan laporan lengkap](#)

Ringkasan

Penelitian ini mengevaluasi ketahanan sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah Kenya dari sisi dasar hukum, kebijakan, dan kerangka peraturan. Penelitian mempelajari protokol dan langkah pengendalian yang berlaku untuk menegakkan transparansi dan sistem yang kompetitif. Selain itu, penelitian melihat tingkat kepatuhan pada praktik PBJ pemerintah, terutama selama masa respons COVID-19, ketika metode pengadaan dengan kompetisi lebih rendah dan tata cara pengadaan darurat digunakan. Lebih jauh, penelitian ini mempelajari implementasi komitmen Kenya terhadap Rencana Aksi Nasional jilid ketiga untuk Open Government Partnership (2018-2020).

Data dan metodologi

Dalam penelitian ini, kerangka analisis mengacu kepada standar global dan nilai serta prinsip yang ditetapkan di dalam undang-undang dasar negara. Penelitian menggunakan sistem indikator dan serangkaian dimensi/kriteria yang bersumber dari dua kerangka, yaitu metodologi Neraca Belanja Pemerintah dan Keuangan (*Public Expenditure and Finance Accountability*, PEFA) dan Metodologi Penilaian Sistem PBJ Pemerintah (*Methodology for Assessing Procurement Systems*, MAPS). Kerangka analisis terdiri dari tiga pilar yang dibagi ke dalam enam indikator dan 19 dimensi/kriteria.

Data yang digunakan untuk menganalisis setiap indikator meliputi:

- Tinjauan pustaka terhadap dokumen dan informasi yang dapat diakses publik, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang sistem PBJ pengadaan, penelitian terdahulu, laporan penilaian, dan data yang diambil dari portal resmi Informasi PBJ Pemerintah (PPIP).
- Jika informasi tambahan dibutuhkan, badan pemerintah yang terkait diminta menyediakan informasi dan klarifikasi. Survei juga dilaksanakan terhadap beberapa pihak terpilih, baik di dalam maupun di luar badan pemerintah, yang bidang kerja dan program organisasinya bersentuhan dengan sistem PBJ

pemerintah, keuangan negara, ataupun tata pemerintahan secara umum di Kenya. Survei mendapatkan respons dari total 23 responden: 52% mewakili masyarakat sipil di tingkat nasional; 35% masyarakat sipil tingkat daerah; dan 3% warga. Pendekatan yang sama diterapkan dalam Wawancara Informan Kunci (WIK), dengan tujuh informan kunci terpilih.

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Kerangka sistem PBJ pemerintah	<p>Kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan di Kenya berpotensi menciptakan sistem PBJ pengadaan yang terbuka, transparan, dan kompetitif serta sesuai dengan standar global.</p> <p>Namun, penelitian menemukan bahwa protokol dan langkah kendali mengandung hal-hal yang tidak konsisten, saling berlawanan, dan tidak lengkap, sehingga tampaknya melemahkan sistem PBJ itu sendiri.</p> <p>Sistem PBJ tidak dapat memfasilitasi penilaian terhadap hasil PBJ, penegakan peraturan, dan kepatuhan terhadap protokol dan kontrol yang berlaku.</p>	<p>Penguatan protokol dan kontrol untuk menciptakan sistem PBJ pemerintah yang transparan dan kompetitif dan penegakan peraturan. Revisi UU 2015 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengatasi ketentuan yang tidak konsisten dan saling berlawanan di dalam kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan. Secara umum, UU 2015 dan peraturan 2020 perlu memberikan ketentuan yang jelas tentang pelaksanaan PBJ dengan metode yang kurang kompetitif.</p>
Pelaksanaan protokol dan langkah kendali	<p>Pelaksanaan protokol dan kontrol PBJ tidak memadai; hal ini menunjukkan penegakan peraturan dan pengawasan yang lemah. Dari sekitar 40.000 badan pemerintah Kenya yang melakukan pengadaan, hanya 433 (1%) yang sudah terdaftar di dalam PPIP per 15 Juni 2020.</p> <p>Selain itu, dari seluruh badan yang terdaftar, hanya 125 yang menerbitkan data pengadaan selama periode penelitian. Selain itu, berdasarkan analisis penelitian terhadap isi data kontrak, informasi di laman utama PPIP tidak mencerminkan data kontrak aktual yang disediakan di</p>	<p>Penguatan mandat keterbukaan PBJ pemerintah dengan menyelaraskan ketentuan tentang publikasi data PBJ.</p> <p>Disarankan agar pasal 67 di dalam UU 2015 dihapus; pasal ini melarang keterbukaan semua data PBJ. Ketentuan ini perlu diganti dengan ketentuan yang sesuai dengan OCDS dan mendukung keterbukaan proaktif dari seluruh data PBJ pemerintah, termasuk Pasal 138 (1). Jika berlaku pengecualian, justifikasi perlu</p>

	<p>dalam portal. Data kontrak di PPIP mengandung hal-hal yang tidak konsisten dan kesalahan, misalnya tanggal yang berbeda dari tanggal sebenarnya penetapan kontrak.</p>	<p>diberikan dan disajikan sama dengan ketentuan Pasal 90 (1), Pasal 138 (5), Pasal 167 (3) dan Pasal 44 (3).</p>
<p>Publikasi data</p>	<p>Hasil akhir dari PBJ yang menggunakan metode berbeda (kompetisi lebih rendah) tidak dikecualikan dari keterbukaan. Namun, hanya satu kontrak, dari seluruh kontrak dengan nilai total sekitar KES 189 miliar yang dihimpun penelitian, yang terkait secara langsung dengan belanja darurat COVID-19 (per 15 Juni 2020). Kontrak yang dikecualikan dari keterbukaan hanya kontrak yang diberikan kepada badan keamanan nasional. Belanja pemerintah dari Dana Darurat (DD) COVID-19 diperbolehkan menggunakan metode PBJ nonkompetitif, namun pengelolaan DD COVID-19 harus sejalan dengan hukum keuangan negara dan PBJ di Kenya—sesuai dengan ketentuan tentang informasi PBJ pemerintah dan belanja terkait di dalam Peraturan 13 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Informasi non-keuangan diterbitkan dengan segera dan diperbarui setiap hari, tetapi data keuangan terbatas.</p>	<p>Penguatan interoperabilitas berbagai portal publik; buat portal atau pangkalan data PBJ pemerintah yang tunggal dan terpusat dengan mengubah ketentuan Pasal 91 (3). Desain PPIP, IFMIS, MyGov, dan Makueni County disarankan diubah; PPIP diberikan mandat sebagai pangkalan data PBJ pemerintah yang terpadu. Dalam mendesain ulang PPIP, disarankan agar portal menerapkan OCDS dan memastikan agar sistem dapat beroperasi, termasuk mengaktifkan fungsi filter dan pencarian data.</p>
<p>Partisipasi</p>	<p>Pengelolaan DD COVID-19 tidak partisipatif, walaupun warga Kenya diundang untuk memberikan pendapat terhadap rancangan peraturan saat perumusan peraturan PFM atas DD COVID-19. Dalam analisis, isi Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara yang disahkan dibandingkan dengan rekomendasi masyarakat sipil yang diserahkan melalui dua dokumen—dokumen gabungan oleh Transparency International dan organisasi</p>	<p>Partisipasi warga, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain dalam PBJ pemerintah, termasuk pihak yang mungkin tidak berkepentingan secara langsung dengan PBJ tertentu, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas sistem PBJ pemerintah. Hal ini bisa dicapai dengan memperluas mandat partisipasi di luar ketentuan tentang partisipasi peserta</p>

	<p>masyarakat sipil lainnya dan dokumen dari Open Governance Institute (OGI). Analisis menunjukkan bahwa tidak satu pun butir rekomendasi diadopsi di dalam peraturan.</p>	<p>lelang dan perwakilannya (Pasal 78 (4)). Tujuannya adalah menciptakan ruang partisipasi yang bermakna bagi warga dan aktor non-pemerintah</p>
<p>Pelaksanaan keterbukaan PBJ pemerintah</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa sistem PBJ pemerintah Kenya tidak sejalan dengan standar, nilai, dan prinsip global tentang PBJ terbuka. Teknologi sudah digunakan untuk memperkuat sistem PBJ, dan jilid tiga Rencana Aksi OGP 2018-2020 mencantumkan komitmen khusus tentang implementasi OCDS. Namun, struktur data PBJ yang tersedia di dalam Portal Publik Kenya belum mengikuti format OCDS. Di tingkat daerah, hanya Makueni County yang sudah menerbitkan data OCDS.</p> <p>[Catatan: Pada 1 September 2020, presiden memberi arahan kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat sistem PBJ pemerintah digital dalam kurun 30 hari setelah terdapat kenaikan kasus suap terkait COVID-19.]</p>	<p>Untuk meraih manfaat penuh teknologi dan agar sistem PBJ sejalan dengan format OCDS serta mendukung keterbukaan penuh data pengadaan, peneliti menyarankan desain ulang PPIP dan interoperabilitas antar berbagai portal publik dan sistem pengadaan elektronik, baik secara vertikal (pusat dan daerah) dan horizontal (badan pelaksana pengadaan). Tujuannya adalah menciptakan pangkalan data PBJ yang terpusat dan seragam. Untuk itu, pasal 91 (3) dari UU 2015 perlu direvisi agar memberikan mandat kepada PPIP sebagai platform utama bagi data atau pangkalan data PBJ pemerintah.</p>
<p>Pelaksanaan rencana aksi OGP</p>	<p>Rencana Aksi OGP Kenya yang ke-3 memiliki dua komitmen yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan Kenya tentang sistem PBJ pemerintah. Komitmen ini mampu mendukung implementasi PBJ pemerintah yang progresif, namun pelaksanaan komitmen berjalan dengan lambat. Saat dianalisis, kedua komitmen belum tuntas dilaksanakan meski tinggal enam bulan dari tenggat implementasi yang telah diperpanjang ke Desember 2020. Kedua komitmen juga tidak cukup tercermin di dalam sistem tata pemerintahan yang lebih luas.</p>	<p>Disarankan agar proses OGP disebarluaskan dan dijadikan bagian dari tata dan sistem pemerintahan yang lebih luas.</p> <p>Tingkatkan peluang reformasi dengan mendanai komitmen OGP sebagai kewajiban utama pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah pusat perlu membuat kebijakan yang menyebutkan mandat organ-organ pemerintah sebagai pemangku inisiatif OGP pada tingkat pusat dan daerah.</p>

Lithuania

Transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah di tengah COVID-19

Penelitian: Transparency International Lithuanian Chapter (TILC)

[Tautan laporan lengkap](#)

Ringkasan

Krisis kesehatan global yang masih berjalan, dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan layanan kesehatan dan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi di sebagian besar negara-negara dunia, termasuk Lithuania. Pemerintah di berbagai belahan dunia telah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mencegah penularan. Hal ini meliputi keputusan cepat untuk mengalokasikan ulang sumber daya—sering kali dengan melewati prosedur *checks and balances* yang seharusnya berlaku dalam pembelanjaan anggaran. Memastikan keamanan masyarakat jelas penting, namun percepatan dan penyederhanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah yang kemudian terjadi pada masa pandemi tidak seharusnya menihilkan nilai penting transparansi. Perhatian secara khusus harus diberikan kepada pengadaan obat-obatan dan persediaan medis lainnya terkait penanganan COVID-19. Menurut Komisi Eropa, di Uni Eropa, 28% dari kasus korupsi di bidang kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat medis. Dengan demikian, PBJ yang terbuka dan transparan adalah hal yang esensial pada masa genting ini.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Transparency International Lithuanian Chapter (TILC) dan berfokus pada dua hal: advokasi untuk peningkatan pengawasan belanja PBJ pemerintah semasa pandemi; dan pengumpulan dan analisis data atas kontrak yang tidak dibuka di portal PBJ pemerintah. Penelitian bertujuan mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai status PBJ terkait penanganan COVID-19 oleh badan-badan pemerintah dengan nilai pengadaan terbesar dan dukungan yang diterima oleh rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19.

Data dan metodologi

Untuk menghimpun data, TILC mengirimkan Permohonan Kebebasan Informasi (FOIA) kepada 10 badan pemerintah terbesar sebagai pelaku pengadaan (dari segi jumlah dan

nilai kontrak yang ditetapkan menurut laporan Lembaga Pengadaan Nasional Lithuania [PPO] dan kepada lima rumah sakit rujukan COVID-19. Secara total, permintaan informasi dikirimkan kepada 12 pelaku pengadaan, karena beberapa organisasi memenuhi kriteria kedua kategori sasaran permohonan.

1. Kepada para pelaku pengadaan, TILC meminta informasi berikut:
 - a. Semua kontrak PBJ terkait penanganan COVID-19 yang ditetapkan antara Januari-Mei 2020 (pengadaan alat pelindung diri [APD], alat medis khusus penanganan COVID-19, alat uji, dll.), jika belum atau tidak tersedia di sistem PPO.
2. TILC juga meminta informasi berikut mengenai data kontrak yang disediakan:
 - a. Apakah semua kontrak PBJ terkait penanganan COVID-19 dari Januari hingga Mei 2020 sudah selesai dilaksanakan? Jika belum, apa alasannya, dan kapan tanggal perkiraan penyelesaian setiap kontrak yang masih berjalan?
 - b. Lembaga mana (jika ada) yang menerima distribusi APD dan alat penanganan COVID-19 lainnya, yang diadakan melalui PBJ pemerintah, pada periode Januari-Mei 2020, dan berapa banyak perlengkapan yang diterima?
 - c. Bantuan jenis apa yang diberikan oleh donor (mana pun) kepada lembaga Anda dalam rangka menanggulangi COVID-19 pada periode Januari-Mei 2020? Mohon sebutkan nama lembaga/organisasi donor dan jenis bantuan (mis. masker, cairan pembersih tangan), berapa unit, nilai bantuan, dan kapan bantuan diterima.

Secara total, tim peneliti menerima informasi tambahan berupa 73 kontrak PBJ terkait penanganan COVID-19 yang tidak tersedia di portal PPO (informasi diserahkan hingga 7 September 2020). Nilai total dari 73 kontrak ini adalah EUR 5,53 juta.

Upaya Advokasi

Sebagai bagian dari penelitian, tim TILC ikut serta dalam beragam kegiatan advokasi yang menyoroti pentingnya membuka informasi kontrak PBJ dalam keadaan darurat. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan diskusi bersama pemangku kepentingan lain untuk menyusun rekomendasi mengenai perbaikan PBJ pemerintah dalam keadaan darurat.

1. Terlibat dalam advokasi publik di media dan ranah publik. TILC berkomunikasi setidaknya tiga kali ([1](#), [2](#), [3](#)) dengan pihak media tentang pentingnya keterbukaan

data dan setidaknya empat kali ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#)) tentang efektivitas pengelolaan PBJ pemerintah yang terkait dengan penanganan COVID-19.

2. Berkomunikasi aktif dengan pemangku kepentingan kunci, seperti pelaku pengadaan terbesar, rumah sakit terbesar, Lembaga Pengadaan Nasional Lithuania/PPO, Badan Investigasi Khusus, dan Badan Audit Nasional. Komunikasi aktif meliputi diskusi ([diselenggarakan oleh PPO dan TILC](#)) tentang langkah persiapan yang efektif untuk melaksanakan PBJ pemerintah yang transparan dan efisien dalam konteks mengantisipasi potensi gelombang kedua COVID-19. TILC juga menghadiri dua kegiatan publik ([1](#), [2](#)) tentang PBJ terkait penanganan COVID-19 dan pentingnya membuka data PBJ.
3. Mengirimkan 12 permohonan informasi kepada pelaku pengadaan terbesar untuk PBJ terkait COVID-19 dan rumah sakit rujukan; ikut membangun wacana tentang pentingnya keterbukaan data PBJ pemerintah. Kegiatan ini turut mendorong dua pelaku pengadaan; Badan Material Pertahanan untuk [menerbitkan sebagian data](#) kontrak PBJ mereka serta dan RS Santaros untuk membuka [bantuan yang mereka terima](#).

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Keterbukaan Reaktif	9 dari 12 organisasi menjawab permohonan informasi dari TILC dan menyediakan setidaknya sebagian informasi yang diminta tentang PBJ pemerintah untuk penanganan COVID-19 serta bantuan yang diterima, jika ada (per 7 September 2020). Informasi yang dihimpun termasuk, antara lain, kontrak pengadaan alat medis dan APD, cairan disinfektan, obat-obatan, layanan pembersihan. Sebagian informasi menyebutkan secara terperinci status kontrak, distribusi barang dan jasa, dan donasi yang diterima.	Umumkan semua kontrak PBJ pemerintah yang terkait dengan respons COVID-19 serta bantuan yang diterima dalam format data terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. Perbaiki mutu data dan pastikan informasi yang diumumkan sudah lengkap. Manfaatkan, misalnya, penanda penyedia dari register resmi dan pastikan jenis barang sudah dimasukkan ke dalam kategori yang benar—ada kalanya,

<p>Nilai kontrak yang datanya dibuka</p>	<p>Terdapat 73 informasi tambahan berupa kontrak PBJ pemerintah dengan nilai total EUR 5,5 juta—kontrak-kontrak ini belum dibuka oleh Kantor Pengadaan Publik (PPO). Informasi ini diterima sebagai hasil permohonan FOIA oleh TILC. Secara total, nilai kontrak yang dibuka di PPO dan terkait dengan penanganan COVID-19 adalah EUR 84,4 juta.</p> <p>Satu kontrak kemudian diketahui <u>tidak</u> terkait COVID-19 (sebelumnya diterbitkan di PPO sebagai kontrak terkait). Hal-hal ini menunjukkan bahwa identifikasi kontrak terkait COVID-19 menggunakan sistem pengadaan elektronik saat ini tidak mudah, dan sistem tidak mencantumkan semua kontrak. 60% kontrak yang berasal dari informasi tambahan adalah kontrak bernilai kecil (dari 73 kontrak, 12 di antaranya bernilai di bawah EUR 10.000, sehingga pengadaannya tidak wajib menggunakan sistem elektronik). Sangat sedikit kontrak tambahan yang terkait dengan pengadaan APD atau disinfektan; barang/jasa yang diadakan beragam dari obat-obatan hingga jasa sarana “karantina” keliling atau layanan hotel untuk isolasi pasien COVID-19.</p>	<p>APD yang sama dimasukkan ke kategori barang berbeda.</p> <p>Tetapkan periode yang lebih singkat untuk membuka data PBJ dalam keadaan darurat.</p> <p>Umumkan status dan ketuntasan kontrak.</p> <p>Buka informasi tentang titik alokasi barang yang dibeli (lokasi penerima barang)</p> <p>Terbitkan rencana PBJ atau pekerjaan, termasuk dalam hal keadaan darurat, khususnya jika tidak banyak tersedia informasi tentang keadaan pasar dan penyedia yang layak.</p> <p>Pastikan para pakar dari berbagai bidang (kedokteran, kimia, biologi, dll.) dilibatkan dalam pengambilan keputusan (usulan dicatat dari kegiatan diskusi dengan pemangku kepentingan)</p> <p>Pusatkan kegiatan PBJ pemerintah agar kebutuhan bisa terkonsolidasi dan sesuai dengan kompetensi pelaku pengadaan.</p>
<p>Keterbukaan data pelaksanaan kontrak</p>	<p>5 dari 9 pelaku pengadaan yang menjawab permintaan informasi TILC menyatakan sumber barang dan jasa yang diadakan untuk merespons COVID-19. Informasi ini berguna untuk menghubungkan anggaran dengan kontrak dan barang/jasa yang dibeli, dan memantau pelaksanaan dan pemenuhan kontrak.</p>	
<p>Keterbukaan kontrak</p>	<p>5 dari 9 pelaku pengadaan yang menjawab permohonan informasi TILC membuka status pelaksanaan kontrak</p>	

<p>terkait COVID-19</p>	<p>terkait respons COVID-19. Informasi ini tidak tersedia di ranah publik. Sekitar 53% kontrak masih berjalan, 42% sudah selesai, dan hampir 5% kontrak dibatalkan.</p>	
<p>Data penyedia</p>	<p>TILC menerima informasi tambahan berupa 73 kontrak terkait COVID-19 yang diberikan kepada 46 penyedia berbeda. Dua penyedia ada di dalam daftar 10 penyedia dengan nilai kontrak besar (menurut data kontrak yang dibuka oleh Kantor Pengadaan Publik). Berdasarkan permintaan informasi tambahan, diketahui ada tambahan EUR 1 juta dalam nilai kontrak yang dapat diperhitungkan untuk kedua penyedia itu.</p>	<p>Buat basis data yang dapat diakses publik berisi daftar penyedia yang bisa diandalkan untuk PBJ terkait respons COVID-19 (beserta data terbuka tentang pemilik manfaat akhir)</p> <p>Pastikan ada mekanisme yang efektif untuk mengendalikan konflik kepentingan di PBJ pemerintah.</p>
<p>Data donasi</p>	<p>Data donasi dibuka oleh 3 dari 6 pelaku pengadaan yang diminta memberikan informasi tentang hal ini. Total nilai donasi yang diterima ketiganya mencapai hampir EUR 1,5 juta.</p> <p>Sebagian donor yang disebutkan di dalam data dari tiga RS turut serta dalam PBJ pemerintah sebagai penyedia dari tiga RS yang sama.</p>	

Nepal

Peneliti: Young Innovations

Status: Penelitian ini tertunda akibat pandemi.

Ringkasan

Penelitian tindakan ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kekosongan yang ada dan memberikan rekomendasi konkret untuk membantu pemerintah daerah menyusun peraturan yang dibutuhkan, mekanisme dan praktik untuk meningkatkan transparansi, pelibatan publik, dan efektivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah secara keseluruhan terkait respons COVID-19 di tingkat daerah di Nepal.

Penelitian ini bertujuan mengetahui cara-cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah seperti DSMC untuk membuat PBJ terkait respons COVID-19 lebih efektif.

Secara khusus, penelitian bertujuan:

- Mengetahui dan mengidentifikasi kasus-kasus terkait korupsi, kewajaran, dan efisiensi PBJ COVID-19 di DSMC
- Menyusun dan menguji pendekatan praktis untuk menata, mengelola, dan mengumpulkan data perencanaan dan implementasi PBJ pemerintah terkait COVID-19 dengan lebih efektif dan efisien
- Mengetahui mekanisme praktis dan kerangka peraturan tingkat daerah yang memungkinkan PBJ pemerintah terkait COVID-19 berjalan lebih transparan dan efektif.
- Mengetahui mekanisme pelibatan warga dan organisasi perwakilan warga untuk memantau dan memperbaiki PBJ pemerintah terkait respons COVID-19.

Nigeria

Memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 melalui pelibatan pengguna sistem dan keterbukaan data di Kaduna

Peneliti: Follow Taxes dan WeCare Foundation

[Tautan laporan lengkap](#)

Ringkasan

Sejak tahun 2015, negara bagian Kaduna telah melakukan langkah-langkah terencana untuk memastikan pemerintah daerahnya lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Atas inisiatif ini, Kaduna menduduki peringkat pertama di antara 36 negara bagian Nigeria dalam Open State Ranking dari Public and Private Development Centre (PPDC) Procurement Monitor. Kaduna bergabung dengan Open Government Partnership (OGP) pada tahun 2018 dan menyatakan lima komitmen strategis di bidang-bidang berikut dari keterbukaan pemerintah: penganggaran yang partisipatif, data pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah yang terbuka, kemudahan berusaha di sektor pemerintah, masukan warga, dan hak terhadap informasi. Sistem dan perangkat pun dikembangkan dengan fokus pada tata kelola dan pembelanjaan keuangan negara. Kaduna juga membuka proses PBJ-nya dan membuat portal PBJ pemerintah yang terbuka, agar warga bisa mengakses data pengadaan dan berpartisipasi dalam hal anggaran.

Akan tetapi, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang tidak terduga bagi masyarakat. Akibatnya, pemerintah harus bertindak di luar kebiasaan dan memberlakukan prosedur PBJ dalam keadaan darurat. Mengingat prosedur ini timbul dari keadaan yang terjadi secara mendadak dan tidak dapat diprediksi, pengambilan keputusan pun harus dilakukan dengan cepat dan barang/jasa yang dibutuhkan umumnya belum dianggarkan sebelumnya. Hasilnya, prosedur dilaksanakan secara berbeda-beda dan muncul beragam isu terkait akses kepada informasi yang diperlukan. Selain itu, PBJ darurat biasanya bernilai besar, sehingga dana darurat amat rentan mengalami penyimpangan.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi sistem PBJ terbuka yang telah dicanangkan pemerintah Kaduna, dan untuk mengetahui dampak sistem ini terhadap pelaksanaan pengadaan, peneliti melakukan wawancara mendalam dan survei daring terhadap badan pemerintah, media, OMS, dan aktor sektor swasta. Penelitian menghasilkan

temuan tentang konteks pengguna sistem dan peluang serta rekomendasi perbaikan bagi PBJ darurat yang lebih baik di Kaduna.

Data dan metodologi

Penelitian ini menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Populasi studi adalah pemangku kepentingan dan individu yang pernah terlibat dengan PBJ pemerintah Kaduna dalam berbagai kapasitas. Responden dibagi ke dalam dua kelompok: aktor negara (terdiri dari pejabat pemerintah) dan aktor non-negara (penerima manfaat atau pengguna platform dan informasi seputar PBJ pemerintah).

Terhadap aktor negara, peneliti mewawancarai satu individu dari masing-masing empat kementerian (Keuangan, Anggaran dan Perencanaan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum), serta Lembaga Pengadaan Pemerintah Kaduna (KadPPA). Untuk aktor non negara, peneliti menyurvei 138 kontraktor, perwakilan kelompok masyarakat sipil, dan jurnalis.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan:

- Mengidentifikasi sistem dan perangkat yang digunakan dalam PBJ darurat selama pandemi COVID-19 di negara bagian Kaduna
- Mengidentifikasi bagaimana sistem PBJ pemerintah memungkinkan warga melacak PBJ darurat selama pandemi COVID-19
- Menilai praktik pengelolaan perubahan dalam peraturan pengadaan Kaduna dan sistem PBJ negara bagian, serta dukungan peraturan terhadap proses PBJ yang terbuka.

Temuan dan rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Sistem dan perangkat PBJ pemerintah	Negara bagian Kaduna menggunakan beragam sistem dan perangkat untuk kebutuhan PBJ-nya, termasuk: Aplikasi “Eyes and Ears”: aplikasi buatan lokal yang menilai kinerja PBJ pemerintah. Aplikasi independen ini berada di bawah Departemen Pemantauan & Evaluasi dari Komisi Anggaran dan Perencanaan Kaduna. Portal PBJ Terbuka & Portal-e PBJ Pemerintah Kaduna: Menyediakan sistem yang mendukung keterbukaan data PBJ,	Kaduna perlu meningkatkan sistem internal dan eksternalnya untuk manajemen informasi yang lebih optimal dan memastikan efisiensi satu sistem yang seragam. Kaduna perlu mempertimbangkan membuat proses dokumentasi kontrak

	<p>dokumen, dan informasi yang dimiliki KadPPA.</p> <p>Microsoft Navision: aplikasi akuntansi dari Microsoft yang digunakan Kementerian Keuangan.</p> <p>Media elektronik: WhatsApp, surel, dll. digunakan oleh semua kementerian, departemen, dan badan pemerintah lainnya di Kaduna.</p> <p>Penyediaan informasi secara manual oleh unit-unit layanan pengadaan di bawah kementerian, departemen, dan badan pemerintah lainnya.</p>	bersama dengan kementerian, departemen, dan badan pemerintah lainnya agar PBJ menjadi lebih mudah lagi.
Pelibatan pemangku kepentingan	<p>Pelibatan pemangku kepentingan dalam PBJ pemerintah di negara bagian Kaduna sangat aktif. Hal ini bisa jadi merupakan alasan tersedianya beragam sistem dan perangkat di Kaduna. 61% responden survei menyatakan sangat tahu atau tahu tentang sistem PBJ darurat dengan penyedia tunggal.</p> <p>Responden survei memanfaatkan perangkat/sistem PBJ yang tersedia. Sebagian besar menggunakan portal Kad-OCDS, situs KDSG, dan aplikasi untuk laporan warga.</p>	
Adopsi sistem PBJ terbuka	<p>Sistem yang ada telah terbukti efektif dalam memastikan dan mempercepat pengadaan di Kaduna, namun pemerintah negara bagian ini masih perlu melakukan berbagai langkah untuk memastikan sistem berjalan seefektif yang diinginkan. Sistem saat ini sudah memenuhi fungsi memberikan kemudahan pengadaan, tetapi masih ada kendala teknis yang dihadapi oleh baik pemerintah daerah maupun pengguna umum.</p>	
Umpan balik pengguna	Aktor pemerintah menyatakan bahwa Kaduna memiliki pedoman yang	Diperlukan pengembangan kapasitas untuk petugas teknis

	<p>menetapkan batasan-batasan pengadaan dan pedoman ini terbuka untuk semua pihak. Berkat praktik keterbukaan, evaluasi teknis dan proses PBJ tidak mengalami kendala berarti selama pandemi COVID-19 karena Kaduna telah menggunakan sistem digital sebelum pandemi terjadi.</p> <p>Penelitian ini menemukan bahwa kementerian, lembaga, dan institusi (K/L/I) pemerintah lainnya saat ini memantau PBJ menggunakan sistem dan aplikasi umpan balik yang berbeda-beda, yang dikelola oleh unit Pemantauan & Evaluasi dari setiap K/L/I. Artinya, PBJ pemerintah daerah sudah menggunakan proses yang sama di semua K/L/I. Aktor pemerintah yang diwawancarai percaya hal ini memungkinkan PBJ di setiap K/L/I berjalan cukup independen sehingga bisa bekerja dari jarak jauh, tetapi tetap cukup terpusat sehingga akuntabel dan dapat dipantau oleh pemerintah pusat.</p> <p>PBJ pemerintah sudah pernah mengalami digitalisasi, sehingga peralihan sistem berdampak minimal terhadap PBJ darurat di Kaduna. Namun perubahan yang terjadi karena terpaksa telah memengaruhi efisiensi sebagian petugas. Menurut pejabat pemerintah, tantangan terbesar pada masa pandemi adalah kurangnya kapasitas petugas teknis dalam menangani sistem dan perangkat PBJ.</p>	<p>dan untuk memastikan akses 100% daring bagi semua K/L/I dan unit pengadaan. Hal ini bertujuan menurunkan tingkat kompleksitas PBJ, seperti proses registrasi dan dari segi volume dokumen yang harus diserahkan. Cara ini juga membantu pemerintah merekam semua PBJ yang relevan di dalam sistem dan perangkatnya.</p> <p>Negara bagian Kaduna juga perlu mendefinisikan 'PBJ dalam keadaan darurat'.</p>
<p>Kesadaran masyarakat</p>	<p>Sebagian besar (63%) responden survei meyakini bahwa informasi PBJ darurat belum dibuka ke publik, sehingga menghalangi pemantauan warga, meskipun responden memahami tata cara PBJ pemerintah dan mengetahui</p>	<p>Berdasarkan jawaban survei, langkah-langkah berikut dinilai paling bermanfaat untuk memungkinkan warga melacak PBJ darurat selama pandemi COVID-19:</p>

	<p>perangkat/sistem PBJ yang tersedia untuk mengakses data PBJ di Kaduna.</p> <p>Hal ini menunjukkan pemerintah masih perlu meningkatkan kesadaran petugasnya dan masyarakat umum. Aplikasi dan sistem yang tersedia perlu dioptimalkan dari sisi kemudahan penggunaannya. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan akses data yang mudah, dari gawai mana pun, atau dalam bentuk apa pun, sehingga OMS, media, dan warga dapat memperoleh informasi yang diinginkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Situs informasi PBJ di Kaduna yang bisa diakses semua pihak ● Penggunaan media secara aktif untuk membuka PBJ pemerintah kepada publik ● Pelibatan semua pemangku kepentingan (K/L/I, LSM, aktor pemerintah) dalam penyiapan data PBJ darurat di Kaduna ● Pelatihan proaktif untuk pejabat pemerintah tentang proses pelibatan warga dan cara efektif dalam menyampaikan informasi PBJ kepada masyarakat ● Penerbitan informasi PBJ secara tepat waktu pada semua sistem dan perangkat PBJ yang tersedia ● Peningkatan keterbukaan pemerintah dalam memublikasikan data PBJ kepada warga melalui berbagai saluran komunikasi, terutama daring atau media sosial. <p>K/L/I di bawah pemerintah Kaduna juga disarankan mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Twitter dan Facebook agar bisa merespons interaksi warga dengan cepat, sehingga menciptakan hubungan yang efektif dengan semua pihak terkait. Platform yang digunakan juga perlu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang terampil dengan teknologi; platform memberikan kesempatan pelaporan masalah melalui pemantauan pengadaan dan</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		memberikan tanggapan yang cepat dan efektif.
Pengelolaan perubahan dalam kerangka PBJ pemerintah	<p>Data dari pemerintah menunjukkan bahwa Kaduna memiliki sangat sedikit protokol untuk menyesuaikan tata cara PBJ pada masa pandemi COVID-19. Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan audit merilis audit berbasis risiko yang akan ditetapkan menjadi peraturan sebagai langkah koreksi dari pengalaman selama pandemi COVID-19. Peraturan ini juga akan memastikan tersedia cadangan dana dalam keadaan darurat seperti COVID-19 • PBJ di Kaduna telah terpecah menjadi tiga dibandingkan dengan PBJ tingkat nasional. Kementerian Keuangan telah menyatakan akan mengeluarkan strategi baru untuk memperbaiki PBJ pemerintah. • Pemerintah Kaduna baru-baru ini membuat rencana untuk mengharmoniskan beberapa sistem PBJ ke dalam satu platform. Sistem pengadaan elektronik sudah pernah diusulkan bagi seluruh Nigeria, dan Kaduna telah mulai melaksanakannya dengan dukungan Bank Dunia. 	<p>Lembaga Pengadaan Publik Kaduna perlu memastikan agar portal terpadu yang diinginkan benar-benar berkualitas dan mampu menjawab semua kelemahan aplikasi “Eyes and Ears”, serta menyertakan informasi tentang rencana PBJ, pernyataan kuantitas, ringkasan standar, laporan evaluasi bulanan, laporan tinjauan proyek, dan pembayaran.</p> <p>Gubernur (melalui Kepala Badan Pelayanan) perlu menerbitkan Sirkuler tentang OCDS dan sistem dan perangkat yang tersedia di Kaduna, serta memperjelas tujuan setiap sistem dan perangkat.</p> <p>K/L/I perlu memastikan bahwa petugas internal/teknis kunci diberikan pelatihan terbaru tentang OCDS serta sistem dan perangkat yang tersedia di Kaduna.</p>

Paraguay

Mungkinkah keadaan darurat dieksploitasi oleh tindak korupsi?

Peneliti: Centro de Desarrollo Sostenible

[Tautan laporan lengkap \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

[Tautan situs](#)

Ringkasan

Selama pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Paraguay, memberlakukan prosedur pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam keadaan darurat agar berbagai kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat. Pada saat yang sama, hal ini menciptakan ruang bagi inefisiensi dan potensi korupsi dalam PBJ, penggelembungan harga, penurunan kualitas barang dan jasa, dan pengawasan yang tidak memadai. Dalam konteks inilah, Centro de Desarrollo Sostenible (CDS) dan Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) mengadvokasikan pengawasan warga dan transparansi dalam PBJ pemerintah sebagai cara untuk melawan korupsi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah potensi risiko korupsi dapat dideteksi dengan membuka data PBJ dan jenis data yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan oleh warga. Keluaran utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah [situs publik](#) yang memungkinkan penggunaannya mempelajari data PBJ dan memeriksa barang/jasa yang diadakan selama masa darurat, membandingkan harga historis, dan mengidentifikasi penyedia utama serta hubungan di antara mereka.

Data dan metodologi

Peneliti mengumpulkan data PBJ yang dibuka oleh Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sesuai Open Contracting Data Standard (OCDS). Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga perangkat keterbukaan PBJ: *kingfisher collect*, *kingfisher process* dan *kingfisher view*. Secara keseluruhan, peneliti mengumpulkan 179.607 prosedur PBJ dari 2010 hingga Juli 2020⁷, dengan 225 di antaranya ditandai sebagai kontrak terkait respons COVID-19.

Data OCDS ditunjang dengan dataset berikut yang tersedia untuk diakses publik:

- Daftar penyedia yang pernah diberikan sanksi oleh DNCP
- Daftar semua penyedia yang didiskualifikasi oleh DNCP

⁷ Analisis dilakukan terhadap data hingga Juli 2020, namun platform berisi data termutakhir hingga Oktober 2020.

- Indeks inflasi dari data resmi Bank Sentral Paraguay
- Nilai tukar acuan mata uang asing terhadap Guarani yang diterbitkan oleh Bank Sentral Paraguay

Temuan dan rekomendasi

Keluaran utama proyek ini adalah [platform interaktif](#) yang memungkinkan pengguna mengakses data PBJ secara langsung dan mencari:

- [Detail jenis barang](#) yang dibeli pada masa darurat. Perincian mencakup satu kolom data yang mengindikasikan perubahan harga selama pandemi dibandingkan dengan harga rata-rata historis.
- [Pemeringkatan jenis barang](#) yang dibeli, dikelompokkan menurut nilai dan kuantitas.
- [Daftar semua badan pelaku pengadaan](#) yang melakukan pembelian pada masa darurat, beserta nilai total pembelian dan jumlah prosedur
- [Daftar terperinci dari semua prosedur PBJ dalam keadaan darurat](#).
- [Daftar penyedia](#) yang mendapatkan kontrak darurat, dan status pernah/tidak pernah dikenai sanksi oleh DNCP
- Tampilan interaktif yang menunjukkan [hubungan antar-penyedia](#). Penyedia yang memiliki alamat dan informasi kontak yang sama akan terlihat pada tampilan ini.

Sasaran proyek adalah memperkenalkan platform kepada jurnalis dan kelompok masyarakat sipil untuk memfasilitasi pengawasan terhadap prosedur PBJ dalam keadaan darurat. Tabel berikut berisi temuan dan rekomendasi utama yang dicatat selama pengembangan platform.

Topik	Temuan	Rekomendasi
Harga beberapa jenis barang digelembungkan	<p>Melalui dua jenis data di dalam situs (items dan ranking), pengguna dapat menganalisis harga barang yang dibeli pada masa darurat dibandingkan dengan harga historis.</p> <p>Harga beberapa jenis barang lebih mahal dibandingkan pembelian sebelumnya. Respirator, misalnya dibeli dengan harga 176% lebih tinggi daripada masa sebelumnya.</p> <p>Pada beberapa kasus, harga yang lebih tinggi disebabkan perbedaan unit dan bentuk, yang tidak disebutkan di dalam</p>	Perbaiki kualitas publikasi data; sertakan informasi tentang detail jenis barang, harga, dan unit, karena ditemukan ketimpangan antara dokumen PDF dengan data yang diterbitkan.

	dataset. Informasi ini diperinci di dalam dokumen kontrak berformat PDF.	
Hubungan antar-penyedia	<p>Pengguna platform ini dapat dengan cepat melihat hubungan antar-penyedia dan potensi penyimpangan. Satu contoh adalah hubungan antara penyedia bernama Eurotec S.A. dengan Insumos Médicos S.A, yang dimiliki oleh pihak yang sama dan dikenai sanksi oleh DNCP. Platform ini mencantumkan alamat dan informasi kontak sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antar-penyedia.</p> <p>Dengan tampilan interaktif, pengguna bisa mengetahui terdapat satu penyedia yang menangani 70% dari nilai total kontrak yang ditetapkan pada masa darurat.</p>	Dorong penggunaan platform oleh organisasi masyarakat sipil, seperti IDEA, untuk menginvestigasi penyedia, jenis barang, dan badan pemerintah yang melakukan pengadaan.

Filipina

Kontekstualisasi kapasitas pengadaan barang dan jasa perangkat daerah di Filipina dalam merespons pandemi COVID-19: analisis pengambilan keputusan dengan perspektif multikriteria

Peneliti: John Raymond Barajas

[Tautan laporan lengkap](#)

Ringkasan

Dalam merespons pandemi COVID-19, pemerintah daerah di Filipina (provinsi, kabupaten/kota, dan *barangay*) diberikan kewenangan untuk mengalihkan metode pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait COVID-19 ke metode yang dinamai Pengadaan Hasil Negosiasi (Keadaan Darurat). Perubahan ini meningkatkan jumlah ketetapan pemenang tender, tetapi pemerintah daerah masih menemui kesulitan dalam menyerap dana darurat. Tingkat penetapan pemenang tender untuk PBJ terkait COVID-19 dari Januari hingga Juni 2020 hanya mencapai 47%. Selain itu, kelangkaan

suplai barang terkait COVID-19 secara global (seperti alat pelindung diri/APD, alat uji, obat-obatan, peralatan laboratorium), pembatasan arus barang dan jasa lintas kawasan, dan penutupan kantor-kantor pemerintah menambah beban SKPD yang harus beradaptasi dengan perubahan dalam tata cara PBJ.

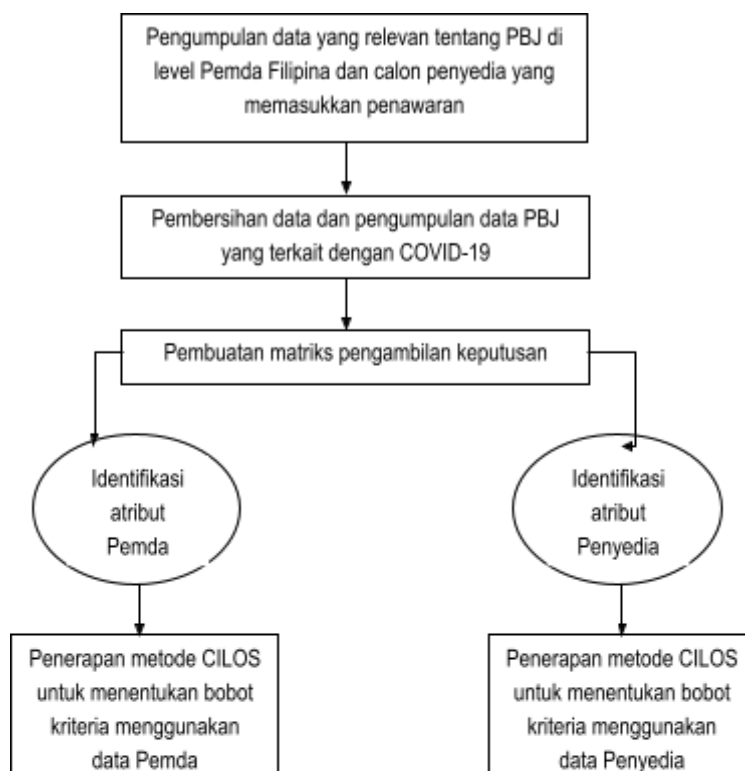
Penelitian ini bertujuan mengusulkan solusi terhadap isu di atas dengan membuat dua sistem indeks yang mengelompokkan SKPD berdasarkan kapasitasnya dalam melakukan PBJ terkait COVID-19 secara efisien, sekaligus memastikan kesesuaian calon penyedia dengan predikat SKPD pelaku pengadaan. Menggunakan pendekatan analisis keputusan dengan multikriteria, SKPD kemudian dikelompokkan ke dalam SKPD berkapasitas “rendah”, “sedang”, dan “tinggi” dalam melakukan PBJ terkait COVID-19. Sementara itu, penyedia barang dan jasa terkait respons COVID-19 dikelompokkan berdasarkan jumlah kontrak yang diraih dan SKPD berbeda yang dilayani. Analisis lebih lanjut terhadap data PBJ menunjukkan bahwa SKPD dengan kapasitas pengadaan rendah paling sesuai dipasangkan dengan penyedia yang mampu memberikan pelayanan hingga ke luar daerah asalnya.

Data dan metodologi

Berikut adalah sumber-sumber data terbuka yang digunakan:

- Data penawaran dan pengumuman pemenang lelang pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Filipina (392.369 tender pemerintah).
- Data penawaran terkait respons COVID-19 pada Portal Daring Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Filipina (11.655 kontrak yang ditetapkan)
- Data Alokasi Pendapatan Internal Pemerintah Daerah (Pemda).

Metodologi penelitian dirangkum ke dalam bagan berikut:



Atribut berikut digunakan untuk menentukan kapasitas PBJ keseluruhan dan PBJ pada masa COVID-19:

- Nilai total anggaran kontrak yang disetujui
- Jumlah total tender yang diumumkan
- Alokasi pendapatan internal
- Jumlah total penyedia yang menjadi mitra kontrak
- Tingkat penyerapan dana negara
- Nilai total anggaran kontrak COVID-19 yang disetujui
- Jumlah total tender terkait respons COVID-19
- Dana darurat
- Jumlah penyedia yang menjadi mitra kontrak untuk PBJ terkait respons COVID-19
- Perkiraan tingkat serapan dana darurat

Atribut berikut digunakan untuk menentukan kapasitas penyedia:

- Nilai total kontrak terkait COVID-19 yang didapatkan penyedia
- Perkiraan kapasitas keuangan bersih penyedia untuk mengikuti PBJ
- Jumlah total kontrak terkait COVID-19 yang didapatkan
- Jumlah total SKPD yang dilayani

Temuan dan rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Tingkat penetapan pemenang tender	Tingkat rata-rata penetapan pemenang tender di SPSE Pemerintah Filipina antara Januari hingga Juni 2020 adalah sekitar 17,31%. Angka ini	Terlepas dari amandemen peraturan yang disebabkan oleh peralihan metode PBJ pemerintah ke metode darurat untuk pengadaan terkait

<p>sebelum aturan PBJ darurat diberlakukan</p>	<p>cukup rendah dan mengindikasikan efek krisis COVID-19 terhadap pemrosesan tender PBJ pemerintah yang sudah diumumkan. Rata-rata tingkat penyerapan dana pemerintah, dilihat dari kontrak yang ditetapkan pada periode yang sama, juga rendah pada 18,85%. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam tender tertutup (yang tidak menerima proposal penawaran) pada periode Februari hingga Maret 2020—periode ketika pemerintahan daerah mulai menerapkan karantina di berbagai wilayah Filipina. Terdapat penurunan drastis dalam jumlah kontrak pada Maret dan April 2020; utamanya karena instruksi nasional yang memberlakukan karantina di seluruh Pulau Luzon. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD kesulitan menggunakan dana untuk PBJ karena COVID-19.</p>	<p>COVID-19, angka kasus COVID-19 yang terus meningkat menjadi indikasi kuat bahwa tingkat penetapan pemenang kontrak belum memadai. Dengan demikian, intervensi untuk meningkatkan PBJ pemerintah masih dibutuhkan.</p>
<p>Tingkat penetapan pemenang tender di bawah peraturan PBJ darurat</p>	<p>Dalam rangka merespons COVID-19, pemerintah Filipina mengesahkan “Bayanihan to Heal as One Act” pada akhir bulan Maret untuk memberikan kewenangan penerapan sistem PBJ pemerintah yang lebih fleksibel (untuk keadaan darurat). Analisis terhadap prosedur ini, yang tidak dilakukan dengan PhilGEPS, menunjukkan bahwa metode darurat mendorong peningkatan signifikan dari tingkat rata-rata penetapan pemenang tender terkait COVID-19 ke 47,11% dan penyerapan dana COVID-19 yang diberikan kepada SKPD ke 55%.</p>	
<p>Kapasitas penyedia</p>	<p>Terdapat setidaknya 1.644 kontraktor (47%) yang memenangkan minimal tiga kontrak. Temuan ini memvalidasi informasi bahwa jumlah penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa terkait respons COVID-19 tidak banyak. Pada saat yang sama, analisis juga menunjukkan bahwa para peserta lelang tersebut masih mampu menangani beberapa kontrak sekaligus</p>	<p>Sistem klasifikasi Pemda dan penyedia COVID-19 perlu diterapkan agar peserta lelang yang sesuai dapat dievaluasi dengan lebih cepat. Alternatif lain adalah mengonversi atribut Pemda dan atribut penyedia menjadi angka untuk menciptakan proses pra-skrining yang otomatis terhadap penyedia yang memenuhi kriteria.</p>

	<p>(berdasarkan perhitungan yang merepresentasikan kapasitas keuangan bersih perusahaan)</p>	<p>Pada saat yang sama, Pemda sangat dianjurkan untuk mengelola data penyedia atau peserta lelang yang memenangkan kontrak dengan pemerintah daerah, karena informasi penting seperti pernyataan <i>Net Financial Contracting Capacity</i> (NFCC) dan domisili peserta lelang belum tersedia di dalam dataset PhilGEPS.</p>
<p>Kapasitas PBJ pemerintah</p>	<p>Sistem indeks mengategorikan Pemda sebagai berkapasitas “rendah”, “sedang” dan “tinggi” dalam PBJ terkait COVID-19. Sementara itu, penyedia dikelompokkan ke dalam empat kategori berdasarkan <i>uptake</i>, jenis kontrak yang dapat mereka layani, dan kemampuan penyedia melayani hingga ke luar daerah asalnya. Dengan memetakan kapasitas Pemda dan penyedia barang dan jasa terkait respons COVID-19, Pemda dapat dipasangkan dengan penyedia-penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Dari jumlah tender yang dibuka untuk Pemda dalam kelas kapasitas PBJ COVID-19 “rendah”, tampak bahwa Pemda pada kategori ini tetap melakukan PBJ terkait COVID-19, namun tingkat penetapan pemenang tender yang rendah menunjukkan bahwa Pemda kesulitan beroperasi selama pandemi.</p> <p>.</p>	<p>Kedua sistem indeks yang dikembangkan di dalam proyek ini masih harus diuji dan dilaksanakan di lapangan. Saran langkah pengembangan ke depan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minta masukan dari petugas pengadaan yang terlibat secara langsung pada tahap pra- dan pascakualifikasi peserta lelang. Masukan petugas dapat menyempurnakan sistem indeks (mis. dengan memasukkan variabel skenario nyata) ○ Sebelum indeks diterapkan, buat model pembelajaran mesin yang bisa membuat simulasi skenario nyata untuk mengatasi situasi tidak terduga ○ Luncurkan dan lakukan uji penerapan indeks di Pemda yang terbuka serta berpengalaman dengan pendekatan berbasis data, seperti Kota Legazpi di Albay. Tujuan tahap percobaan adalah menghindari potensi konflik akibat tekanan politik yang tidak diinginkan. ○ Jika percobaan berhasil, maka sangat disarankan agar sistem indeks diterapkan dan diprioritaskan untuk Pemda berpredikat “rendah” dalam kelas kapasitas PBJ terkait COVID-19.

Uruguay

Benarkah informasi yang lebih terbuka membuat pengadaan jadi lebih baik? Analisis pengadaan barang dan jasa di Uruguay pada masa pandemi COVID-19

Peneliti: Eliana Álvarez, Rodrigo Ceni, Rodrigo Gorga, Victor Koleszar, dan Román Sugo

[Tautan laporan lengkap \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

[Tautan temuan penelitian \(dalam bahasa Spanyol\)](#)

Ringkasan

Krisis pandemi COVID-19 yang tidak terduga bisa menghambat kecepatan dan mutu pengambilan keputusan pemerintah. Bagi para aktor di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ), keadaan darurat bisa jadi menyebabkan tata cara yang biasanya digunakan kini diabaikan, penawaran tidak dievaluasi dengan menyeluruh, atau penyedia yang digunakan hanya penyedia yang sudah dikenal. Semua hal ini bisa mengganggu kebijakan tentang efisiensi belanja pemerintah dan PBJ penting serta mendesak. Krisis ini memberikan peluang untuk memahami peran pemantauan, khususnya oleh warga, terhadap belanja pemerintah dalam memperbaiki transparansi dan perilaku konsumsi badan-badan pemerintah. Menggunakan eksperimen lapangan dengan kelompok *treatment* (kelompok yang diberikan perlakuan tertentu) dan kelompok kontrol (tanpa perlakuan tertentu), penelitian ingin mengetahui apakah penyediaan informasi kepada pembuat keputusan tentang harga yang dibayarkan lembaganya, dibandingkan dengan lembaga lain, bisa mengubah keputusan pembelian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemantauan oleh warga tidak berdampak terhadap baik transparansi maupun perilaku konsumsi pemerintah. Namun, penelitian ini menyajikan pendekatan untuk menganalisis strategi pemantauan yang lebih berhasil. Implementasi OCDS di berbagai negara menunjukkan ada kesempatan untuk menerapkan pendekatan yang sama dan melihat apakah konteks penerapan yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda pula.

Data dan metodologi

Penelitian ini menganalisis data PBJ yang diterbitkan oleh Agencia de Regulación de Compras Estatales (ARCE) yang mengikuti Open Contracting Data Standard (OCDS).

Secara keseluruhan, 518 pengadaan untuk sarung tangan, alkohol, dan masker dianalisis dari 13 Maret hingga 14 Agustus 2020.

Dalam hal eksperimen lapangan, peneliti mengirimkan surel ke 101 badan pemerintah. Badan-badan ini secara acak dimasukkan ke kelompok *treatment* (n=51) dan kelompok kontrol (n=50). Badan yang dipilih adalah yang pernah melakukan pengadaan terkait respons COVID-19 (alkohol, masker, dan sarung tangan) antara 13 Maret (ketika kasus pertama dideteksi di Uruguay) dan 15 Mei 2020. Kedua kelompok percobaan menerima surel. Surel yang dikirimkan kepada anggota kelompok kontrol berisi informasi umum tentang PBJ pemerintah pada tahun 2019. Surel kepada anggota kelompok *treatment* mencantumkan satu paragraf yang merinci pengadaan termahal yang dilakukan penerima surel selama pandemi COVID-19, disertai perbandingan harga dengan harga yang dibayarkan badan pemerintah lainnya. Teknik evaluasi *difference-in-differences* digunakan untuk mengukur dampak informasi terhadap tiga variabel hasil: nilai, kuantitas, dan penetapan pemenang lelang.

Temuan dan Rekomendasi

Topik	Temuan	Rekomendasi
Eksperi- men	<p>Hasil analisis <i>difference-in-differences</i> tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan atau kuat secara statistik. Dengan temuan ini, tidak dapat disimpulkan bahwa pemantauan warga punya dampak langsung pada belanja pemerintah, nilai, dan kuantitas barang yang diadakan.</p> <p>Beberapa potensi penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku yang dapat diamati setelah pengiriman surel sangat terbatas. Setelah surel dikirimkan, hanya 39 badan pemerintah yang melakukan PBJ terkait Covid. • Tingkat surel yang dibaca rendah (49.5%), kemungkinan besar karena alamat surel adalah alamat lembaga, bukan pejabat tertentu. • Periode percobaan terlalu singkat • Metode pemantauan yang dipilih, yaitu korespondensi via surel dengan badan pemerintah, bisa jadi kurang sesuai. • Dibandingkan negara-negara lain, kasus Covid di Uruguay terbilang rendah. Hal ini bisa jadi berpengaruh 	<p>Lakukan eksperimen yang sama di negara lain, terutama negara yang sudah membuka data sesuai OCDS; periode pasca-<i>treatment</i> perlu diperpanjang.</p> <p>Alamat surel diambil dari data kontak di dalam OCDS. Disarankan agar ARCE meninjau kembali akurasi informasi yang diterbitkannya dan melatih petugas mengenai cara input data untuk meminimalkan kesalahan.</p> <p>Sosialisasikan pentingnya mencantumkan data kontak yang benar tidak hanya pada masa lelang, tetapi juga saat kontrak dan pelaksanaannya.</p> <p>Eksperimen mungkin lebih efektif jika disertai metode pemantauan yang berbeda, misalnya yang lebih terbuka, dan bukan pemantauan langsung yang bersifat tertutup.</p>

	terhadap PBJ terkait krisis kesehatan.	
Harga acuan	14 badan pemerintah dalam kelompok <i>treatment</i> menjawab surel; mereka memberikan penjelasan atau menambahkan informasi. Sebagian meminta informasi lebih jauh tentang harga acuan dari beberapa jenis barang. Kekurangan informasi tentang harga acuan bisa menyebabkan inefisiensi dalam keputusan pengadaan.	Buat daftar harga acuan dan penyedia , berdasarkan jenis harga, di OCDS. Daftar harus bisa diakses dengan mudah oleh petugas unit pengadaan agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Kualitas data	Saat membersihkan data, ditemukan berbagai kesalahan dalam hal: pernyataan angka tidak konsisten, nilai yang janggal, dan kolom data yang tidak standar.	Kurangi jumlah kolom data yang harus diisi secara manual; buat aturan validasi saat input data; dan berikan petugas pemerintah pelatihan input data untuk meminimalkan kesalahan.
Kualitas harga (harga per unit barang)	Isu mutu data terkait satuan barang dalam data OCDS menyulitkan analisis harga per unit barang. Sarung tangan, misalnya, bisa dinyatakan dalam satuan per pasang, kotak isi 50, kotak isi 100, dll. Untuk mengetahui unit yang benar, setiap pembelian diverifikasi manual pada situs ARCE.	Tingkatkan publikasi OCDS agar bisa berisi informasi unit harga yang lebih terperinci, deskripsi jenis barang, dan unit satuan barang. Informasi ini sudah ada di portal ARCE, tetapi belum dalam format dataset terbuka.

Tentang Open Contracting Partnership

Open Contracting Partnership merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara aktor pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan pegiat teknologi yang mendobrak sekat-sekat di antara para pelaku ini. Dengan tujuan membuka dan mengubah wajah pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh dunia, kami menyatukan keterbukaan data dan pemerintah untuk memastikan dana publik digunakan secara terbuka, adil, dan efektif. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi perhatian utama, karena pembelanjaan pemerintah yang terbesar ada di ranah ini. Pengadaan merupakan risiko korupsi tertinggi pemerintah. Pengadaan juga proses yang vital untuk memastikan warga mendapatkan hak layanan publik. Berawal dari inisiatif Bank Dunia tahun 2015, Open Contracting Partnership kini merupakan organisasi nirlaba independen yang bekerja di 50 negara. Kami mendorong perbaikan efektivitas belanja anggaran publik, integritas pemerintah, dan pemberian layanan dengan mengubah proses pengadaan pemerintah, dari proses yang tertutup dan manual, menjadi layanan yang digital, adil, efisien, dan dirancang sebagai proses terbuka.

Hubungi:

engage@open-contracting.org

www.open-contracting.org

@opencontracting



**OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP**